

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)



Skripsi
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
Rian Ramadhan
NPM. 1351010031
Program Studi: Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Rian Ramadhan

NPM. 1351010031

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.

Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa data mengenai kondisi Kota Bandar Lampung yang masih tergolong Ibu Kota yang minim semangat berkoperasi dengan ditunjukkan Kota Bandar Lampung menempati urutan paling bawah dibanding ibu kota provinsi lainnya dan koperasi yang tidak aktif lebih mendominasi dibanding koperasi yang aktif, serta terjadi penurunan jumlah koperasi yang aktif dari tahun 2012 ke tahun 2016. Berlandaskan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu sebagai berikut :1). Masih banyaknya koperasi resmi di Kota Bandar Lampung yang tidak aktif; 2). Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kepada koperasi di Kota Bandar Lampung; 3). Masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana, 4). Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi di Kota Bandar Lampung.

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini ialah 1). Bagaimana Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung?, 2). Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan koperasi di Kota Bandar Lampung dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan masyarakat melalui anggota koperasi di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan *purposive sampling*, dimana dari metode tersebut peneliti membagi tiga kategori sebagai sampel, yakni pimpinan/karyawan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Pengelola Koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi, dan Stakeholder. Sedangkan, Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan koperasi di Kota Bandar Lampung sudah cukup optimal, dimana penilaian tersebut didasari atas analisis dari 7 indikator penilaian kinerja yang merupakan teori dari Hersey, Johnshon, dan Blachard, ketujuh indikator tersebut yakni antara lain indikator tujuan, indikator standar, indikator alat/sarana, indikator kompetensi, indikator peluang, indikator motif, dan indikator umpan balik. Kemudian, jika ditinjau dari Ekonomi Islam, Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Daerah, Koperasi.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

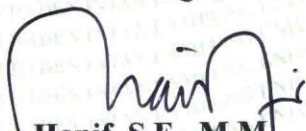
Judul Skripsi : **Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Rian Ramadhan**
NPM : **1351010031**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**


DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


Hanif, S.E., M.M.
NIP. 197408232000031001

Pembimbing II,


Femei Purnamasari, SE., M.SI.
NIP. 198405212015032004

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI : DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG)** Oleh : **RIAN RAMADHAN NPM : 1351010031**,
Jurusan: **EKONOMI SYARIAH**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : **Senin, 12 Februari, 2018**.

TIM PENGUJI


Ketua sidang : **Madnasir, S.E., M.Si.**

(.....)

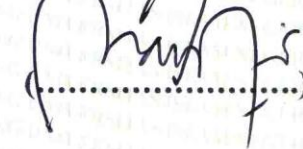
Sekretaris : **A. Hazas Syarif, SE., M.E.I.**

(.....)

Penguji I : **Syamsul Hilal, M.Ag.**

(.....)

Penguji II : **Hanif, SE., MM.**

(.....)

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



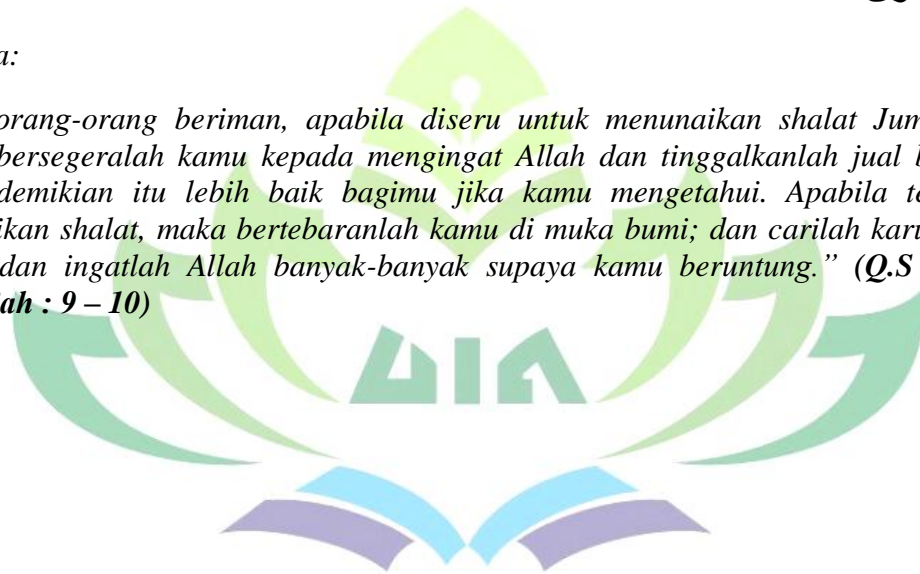
Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا بِالْبَيْعِ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَلْتَنْشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S Al-Jumu’ah : 9 – 10)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Drs. Polian Bentatahan) dan ibunda (Siti Maryam, S.Pd) yang tiada henti-hentinya mendoakan, mengasihi, mendidik dan menyayangiku yang tidak dapat dinilai dengan apa pun serta segala pengorbanan kalian yang tidak bisa ananda balas dengan apa pun juga. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian. Harapan daku melalui karya kecil ini bisa menciptakan senyuman bahagia yang langgeng di sudut dalam bibir manis kalian.
2. Kakakku (Akbar Prima Jaya, S.T) dan Adikku (Nadia Destriantari), terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dan dukungan yang selama ini kalian berikan, semoga kita semua menjadi seorang anak yang selalu dapat menjadikan orang tua kita bangga dan bahagia atas kehadiran kita di dunia ini.
3. Seluruh keluargaku yang selalu mendampingi, membantu dan tidak pernah lelah untuk menasehatiku agar menjadi orang yang lebih baik melalui pencapaian akademik ini.
4. Pembimbing Akademik Bapak Hanif, S.E.,M.M dan Ibu Femei Purnamasari, S.E.,M.Si yang telah membimbing ananda sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh sahabat-sahabatku tercinta yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam lembaran ini, terimakasih karena telah memberikan dukungan, kasih sayang dan canda tawa yang menjadi pelajaran indah dalam kehidupanku.
6. Almamater kebanggaanku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Rian Ramadhan dilahirkan pada tanggal 23 Januari 1996, di Desa Ujanmas Baru Kecamatan Ujanmas Baru Kabupaten Muara Enim, merupakan anak ke-dua dari bapak Drs. Polian Bentatahan dan ibu Siti Maryam, S.Pd.

Riwayat pendidikan penulis mulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang ditamatkan pada tahun 2001, kemudian naik ke jenjang SD di Sekolah Dasar Negeri 02 Ujanmas Baru dan lulus pada tahun 2007, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Muara Enim yang lulus pada tahun 2010, penulis kemudian melanjutkan di MAN 1 Muara Enim yang tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah program S1 Ekonomi Islam, dan pada tahun 2015 UIN Raden Intan Lampung membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang termasuk di dalamnya jurusan Ekonomi Islam.

Riwayat Organisasi Penulis selama menjadi siswa dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra dan ekstra. Penulis pernah menjadi Ketua Departemen di Pramuka Gudep MAN 1 Muara Enim, menjadi Ketua FORPEMIS, menjadi Sekretaris dan Ketua Umum RISMA Uswatun Hasanah di Bumisari - Natar, menjadi Sekretaris Divisi di UKM-F RISEF, menjadi Ketua Tim Ad Hoc Program Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menjadi Kepala Bidang dan Ketua Badan Pengawas di UKM-U Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Ketua Bidang di FKKMI Regional Sumatera, Wakil Ketua Umum Alumni PCTA – Kementerian Pertahanan Provinsi Lampung, dan lain-lain.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)*” dapat terselesaikan. *Shalawat* serta *sallam* disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam*, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahruddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Hanif, S.E., M.M. selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Femei Purnamasari, SE., M.Si. selaku pembimbing II yang telah membina dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Sahabat seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terjalin dalam *ukhuwah islamiyah*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.



Rian Ramadhan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Identifikasi Masalah	18
E. Rumusan Masalah.....	18
F. Batasan Masalah	19
1. Secara Konseptual.....	19
2. Secara Kontekstual.....	19
G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Manfaat Penelitian	20
H. Penelitian Terdahulu	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah	25
1. Pengertian Pemerintah Daerah	25
2. Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah	25
3. Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah	27
4. Dinas Koperasi dan UKM	27
B. Koperasi	29
1. Pengertian Koperasi	29
2. Prinsip-prinsip Koperasi	36
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi	38
C. Kinerja	41
1. Pengertian Kinerja	41
2. Indikator Kinerja	45
3. Kinerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam	48
D. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	52
E. Kerangka Pemikiran	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	62
B. Jenis Penelitian	62
C. Pendekatan Penelitian	62
D. Variabel Penelitian	63
F. Definisi Konsep	63
G. Definisi Operasional	64
H. Instrumen Penelitian	65
I. Subyek Penelitian	65
J. Metode Pengumpulan Data	68
K. Metode Observasi	68
L. Metode Wawancara	69
M. Metode Dokumentasi	70
N. Uji Keabsahan Data	70
1. Triangulasi Teknik	71
2. Triangulasi Sumber	72
O. Metode Analisis Data	72
P. Pengumpulan Data	73
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	74
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	74
3. <i>Conclusion Drawing/Verivication</i>	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	76
2. Gambaran Umum Perkembangan Koperasi di Kota Bandar Lampung	80
3. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	85
B. Sejarah Singkat dan Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	85
1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	92
2. Struktur Organisasi	93
3. SDM Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	95
4. Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	98
C. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi	101
1. Indikator Tujuan	101
2. Indikator Standar	107
3. Indikator Alat atau Sarana	113
4. Indikator Kompetensi	116
5. Indikator Motif	119
6. Indikator Peluang	121
7. Indikator Umpan Balik	123
D. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	129

BAB V PENUTUP

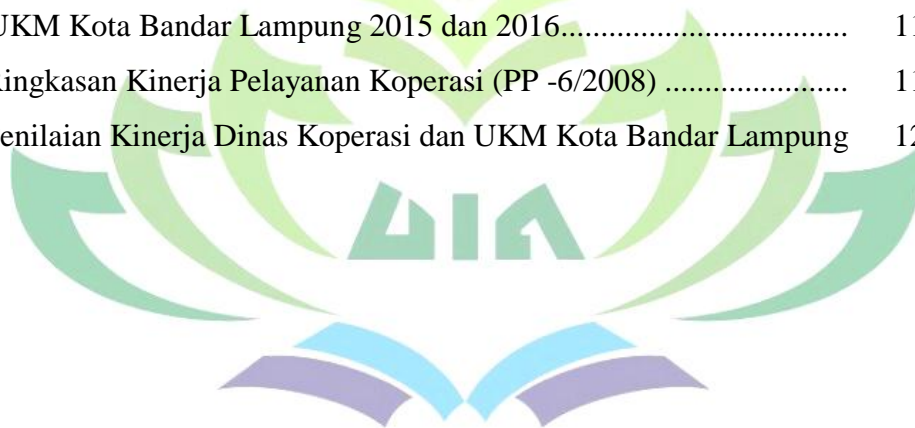
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Jumlah Koperasi Berdasarkan Kota/Kabupaten di Indonesia ...	11
1.2 Perkembangan Koperasi Kota Bandar Lampung Tahun 2012 S/D Desember 2016.....	15
1.3 Perbandingan Penelitian.....	21
2.1 Prinsip Koperasi Menurut ICA	37
3.1 Informan Penelitian.....	67
4.1 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung	78
4.2 Perkembangan Koperasi Kota Bandar Lampung Tahun 2012 S/D Desember 2016.....	81
4.3 Perkembangan Koperasi Baru di Kota Bandar Lampung Tahun 2012 – 2016	81
4.4 Perkembangan Koperasi Menurut Jenis Usaha di Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2016	82
4.5 Daftar Nama Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional	82
4.6 Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin (Posisi 31 Desember 2016).....	95
4.7 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan (Posisi 31 Desember 2016).....	96
4.8 Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang (Posisi 31 Desember 2016).....	97
4.9 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan (Posisi 31 Desember 2016).....	97

4.10 Rencana Kinerja (Tapkin) Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	108
4.11 Standar/Indikator Kinerja Eselon III Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	108
4.12 Standar/Indikator Kinerja Eselon IV Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	109
4.13 Rencana Kinerja Pelayanan Koperasi (PP -6/2008) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	110
4.14 Ringkasan Realisasi Tapkin dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 2015 dan 2016.....	110
4.15 Ringkasan Kinerja Pelayanan Koperasi (PP -6/2008)	111
4.16 Penilaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	128



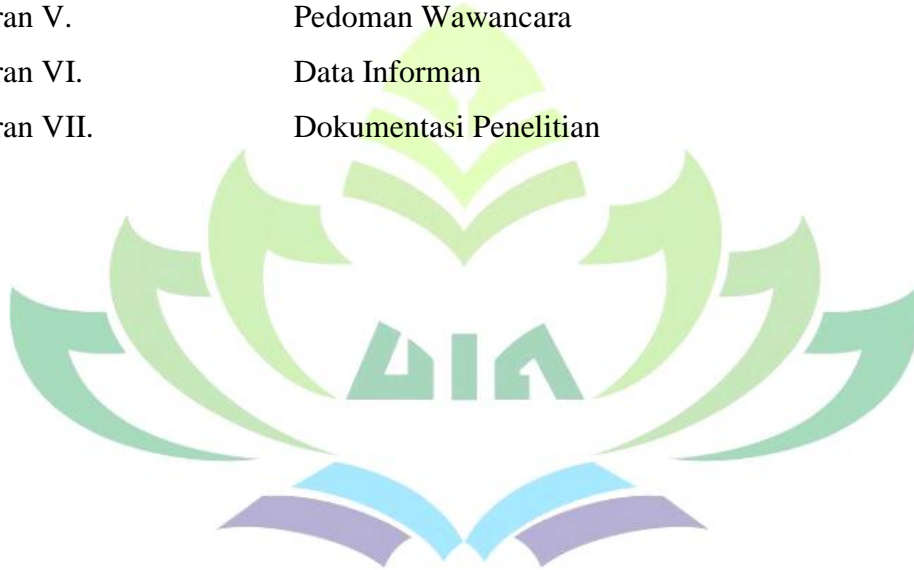
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Wewenang Pemerintah Daerah	25
2.2 Tugas Pemerintah Daerah	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	61
3.1 Triangulasi Teknik	71
3.2 Triangulasi Sumber	72
3.3 Analisis Data	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Surat Izin Penelitian
Lampiran II.	Surat Keputusan (SK) Pembimbing
Lampiran III.	Kartu Kendali Bimbingan
Lampiran IV.	Data Keragaan Koperasi Kota Bandar Lampung
Lampiran V.	Pedoman Wawancara
Lampiran VI.	Data Informan
Lampiran VII.	Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut di sini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹

¹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bab I, Pasal 1.

Pemerintah Daerah di dalam proposal judul ini diartikan sebagai Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan menjadikan objek pembahasannya pada Dinas Koperasi dan UKM kota/kabupaten sebagai bagian dari perangkat daerah.

3. Kesejahteraan Anggota adalah tercapainya kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kesepakatan anggota di dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) melalui usaha yang dilaksanakan oleh koperasi.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

B. Alasan Memilih Judul

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Koperasi dalam kacamata pemerintah dan masyarakat, menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan *multi effects* bagi kemajuan perekonomian suatu daerah, karena koperasi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya atas dasar kredo tolong-menolong dan dilakukan secara *populist*. Tentunya, keadaan tersebut

² Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I, Pasal 1.

dianggap strategis bagi pemerintah pusat/daerah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang sangat menyengsarakan masyarakat menengah ke bawah. Memberdayakan koperasi juga menjadi kewajiban bagi pemerintah sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Tetapi, dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah, kurang menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga, kenyataan ini membuat peneliti tertarik untuk membahas mengenai kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Alasan Subjektif

Penelitian tentang tema ini membantu peneliti untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi peneliti tentang pengembangan koperasi dari lini pemerintahan.

C. Latar Belakang Masalah

Sejak awal, lembaga koperasi diperkenalkan di Indonesia sudah diarahkan kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, dinilai

sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerja sama untuk kepentingan bersama (gotong-royong), dan beberapa esensi moral lainnya.³

Koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal itu ditunjukkan pada ketegasan sikap pasal 33 UUD 1945 dan juga pada pasal 4 UU No.25/1992. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, misalnya koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 4 UU No.25/1995, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴

Koperasi juga diposisikan sebagai soko guru perekonomian Indonesia di masa yang akan datang, hal itu dikarenakan koperasi mengisi tuntutan konstitusional, pembangunan, dan perkembangannya. Koperasi merangkum seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan Pancasila. Secara ideologis-normatif ekonomi Pancasila adalah Pancasila itu sendiri yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945,

³ Tulus Tambunan, *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan : Masih Relevankah Koperasi di Dalam Era Modernisasi Ekonomi ?* (Jakarta : Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti, 2008), h. 2 – 3.

⁴ Daru Retnowati, “Strategi Pengembangan Kelombagaan dan Koperasi melalui Sistem Demokrasi di Indonesia”. (Makalah yang disampaikan pada *Seminar Nasional Informatika 2009*, yang diselenggarakan oleh UPN Veteran, Yogyakarta, 23 Mei 2009), h. 26.

khususnya pada pasal 33 UUD 1945.⁵ Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda, setidaknya terdapat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat.

Wujud peran yang diharapkan dari koperasi sebenarnya adalah agar koperasi dapat menjadi organisasi milik anggota sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.⁶ Menurut Pandangan Islam, Tuntutan dan Posisi ini dapat dinyatakan sebagai posisi penebar *maslahah* (mendatangkan manfaat dan menolak keburukan) bagi masyarakat atau dengan kata lain keberadaan koperasi yang notabene sebagai kumpulan orang-orang bekerja sama dalam satu tujuan merupakan manifestasi dari nilai-nilai ekonomi Islam yang pada akhirnya memberikan kebaikan di dunia dan akhirat (*fallah*).

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang tergolong sebagai *Syirkah/Syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal, serta lembaga yang seperti ini sangat dipuji dalam Islam dan juga merupakan lembaga yang mengedepankan sistem pengambilan keputusan dengan cara

⁵ Herliyana Setiyarini, Wisnu, "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925 – 1953". *Jurnal AVATARA (Pendidikan Sejarah)*, Vol. 2 No. 3 (2014), h. 219.

⁶ Heriyono, "Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat". *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2012), h. 41 – 42.

musyawarah dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan melibatkan seluruh potensi anggotanya. Sebagaimana dalam firman Allah *Azza wa Jalla*,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-maidah/5 : 2).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kegiatan usaha sangat dianjurkan untuk diselenggarakan dengan cara *ta'awun* (bergotong-royong) atau berkoperasi, karena akan memberikan dampak ganda yang baik kepada para pelaku usaha atau anggota yang terlibat selama dilakukan secara baik dan dalam lingkup yang baik. Hal ini juga dipertegas oleh sabda Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihiwasallam*, yakni

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنِهِمَا⁷

⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Jual Beli dan Sewa*, (Beirut : Dar Ar Risalah Al Alamiah, 2009), no. 3383, Bab Jual Beli Persekutuan, h. 264 – 265.

Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku adalah yang ketiga dari dua yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati teman nya. Maka jika ia (salah satunya) mengkhianatinya (teman yang lain), Aku keluar di antara keduanya'. (H.R. Abu Dawud no. 3383).

Keberadaan koperasi sangat memberikan efek positif bagi masyarakat Indonesia dalam membangun perekonomian Negara Indonesia yang bersumber dari kekuatan masyarakat itu sendiri dan motivasi perwujudan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas.

Bertolak dari kondisi ideal di atas, Koperasi di Indonesia dalam perkembangannya sering mengalami pasang dan surut, bahkan secara umum cenderung stagnan. Selama periode yang cukup panjang itu tidak ada satu pun koperasi, baik itu menurut golongan: primer dan sekunder, maupun menurut jenis: produsen, konsumen, jasa, dan simpan pinjam yang berhasil tumbuh menjadi usaha koperasi skala besar seperti pelaku ekonomi non-koperasi yang besar. Yang jelas hingga saat ini Indonesia belum juga berhasil masuk di dalam daftar koperasi-koperasi global menurut versi ICA. Padahal berbagai paket program bantuan dari pemerintah dalam nilai rupiah tidak sedikit telah diberi untuk koperasi-koperasi di Indonesia seperti misalnya kredit program: Kkop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit

Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan skim kredit komersial dari perbankan.⁸

Melihat fakta koperasi yang dijelaskan di atas, mengundang pertanyaan besar tentang arti penting dari tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Kewajiban melaksanakan tugas tersebut bersumber pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tanggung jawab pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan tersebut secara langsung merupakan tanggung jawab pemerintah daerah di setiap masing-masing wilayah administrasi di seluruh Indonesia. Hal ini berdasar pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menetapkan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat : politik luar negeri, keuangan, yudisial, hankam, agama, dan urusan lain. Ini

⁸ Tulus Tambunan, "Identifikasi Rintangan Utama bagi Koperasi Indonesia Menuju Koperasi Global". *Jurnal INFOKOP*, Vol. 23 No. 1 (Oktober 2013), h. 14 – 17.

artinya pemerintah daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sangat luas dan utuh.⁹

Berdasar pada pembagian tugas di setiap pemerintah daerah, maka yang diberikan tugas dan wewenang dalam pembinaan koperasi ialah Dinas Koperasi. Dalam penamaan dan fungsi dinas tersebut, setiap daerah memiliki nama dan fungsi dinas yang berbeda-beda, karena hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan di setiap masing-masing pemerintah daerah dengan tetap mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Untuk Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi di Kota Bandar Lampung, ialah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan PERWALI (Peraturan Walikota) Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan

⁹ Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah* (Jakarta : Grasindo, 2009), h. 3.

Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
4. Pengoordinasian dengan instansi dan lembaga terkait sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Melihat dari lima tugas pokok di atas, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung menjadi aktor utama dan penting dalam pembinaan koperasi di Kota Bandar Lampung dari sisi pemerintahan. Sehingga Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dan maksimal. Akan tetapi, dalam mewujudkan kinerja yang baik tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam memberikan pembinaan terhadap koperasi di Kota Bandar Lampung. Hal ini ditunjukkan dengan

masuknya Kota Bandar Lampung dalam kategori kota yang minim semangat berkoperasi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Indonesia. Dan dalam hal ini penulis hanya mengambil kota/kabupaten dari enam provinsi yang berbeda sebagai sampel untuk perbandingan, yakni Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas perbandingan tersebut, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Koperasi Berdasarkan Kota/Kabupaten di Indonesia

No.	Provinsi	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Jawa Barat	Kota Bandung	2401
2	Jakarta	Kota Jakarta Selatan	1874
3	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	1480
4	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	1438
5	Banten	Kabupaten Tangerang	1415
6	Jawa Barat	Kabupaten Garut	1266
7	Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	1120
8	Bali	Kabupaten Gianyar	1102
9	Bali	Kota Denpasar	1013
10	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	880
11	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	860
12	Jakarta	Kota Jakarta Barat	856
13	Jakarta	Kota Jakarta Utara	824

14	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	776
15	Jawa Barat	Kabupaten SUBANG	776
16	Jakarta	Kota Jakarta Timur	773
17	Banten	Kota Serang	736
18	Jakarta	Kota Jakarta Pusat	736
19	Banten	Kabupaten Lebak	685
20	Banten	Kota Tangerang	667
21	Banten	Kabupaten Serang	658
22	Sumatera Barat	Kota Padang	644
23	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Timur	641
24	Jawa Barat	Kota Bekasi	632
25	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kertanegara	625
26	Bali	Kabupaten Tabanan	556
27	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	555
28	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	526
29	Bali	Kabupaten Badung	521
30	Lampung	Kabupaten Lampung Timur	512
31	Banten	Kota Tangerang Selatan	511
32	Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	508
33	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	495
34	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	492
35	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	463
36	Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	458
37	Banten	Kabupaten Pandeglang	441
38	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	436

39	Jawa Barat	Kota Depok	424
40	Lampung	Bandar Lampung	383
41	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	372
42	Jawa Barat	Kota Bogor	359
43	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman Barat	358
44	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	354
45	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Barat	352
46	Lampung	Kabupaten Waykanan	331
47	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	317
48	Jawa Barat	Kota Sukabumi	312
49	Bali	Kabupaten Karang Asem	307
50	Banten	Kota Cilegon	303
51	Jawa Barat	Kota Cirebon	284
52	Bali	Kabupaten Buleleng	284
53	Jawa Barat	Kota Cimahi	275
54	Bali	Kabupaten Jembrana	252
55	Bali	Kabupaten Klungkung	252
56	Bali	Kabupaten Bangli	252
57	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	246
58	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	242
59	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	223
60	Kalimantan Timur	Kabupaten Berau	213
61	Kalimantan Timur	Kabupaten Penajam Paser Utara	212
62	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	210
63	Lampung	Kabupaten Lampung Utara	207

64	Sumatera Barat	Kabupaten. Tanah Datar	205
65	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	203
66	Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	196
67	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	195
68	Sumatera Barat	Kabupaten Padang Pariaman	177
69	Lampung	Kabupaten Tanggamus	171
70	Lampung	Kabupaten Pesawaran	152
71	Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	137
72	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	133
73	Lampung	Metro	123
74	Lampung	Kabupaten Mesuji	116
75	Sumatera Barat	Kabupaten Solok	108
76	Lampung	Kabupaten Tulang Bawang Barat	103
77	Lampung	Kabupaten Pringsewu	90
78	Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	87
79	Jawa Barat	Kota Banjar	79
80	Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan	67
81	Kalimantan Timur	Kota Bontang	67
82	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman	66
83	Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran	65
84	Sumatera Barat	Kota Pariaman	62
85	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	60
86	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	57
87	Lampung	Kabupaten Lampung Barat	50
88	Lampung	Kabupaten Pesisir Barat	49

89	Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	48
90	Kalimantan Timur	Kabupaten Mahakam Ulu	45
91	Sumatera Barat	Kota Solok	44
92	Sumatera Barat	Kabupaten Mentawai	24
93	Jakarta	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	10

Sumber : Departemen Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2017, diolah peneliti.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung berada pada posisi urutan ke-40 dari 93 Kota/Kabupaten di Indonesia. Menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung masih sedikit intensitas pergerakan dalam mengembangkan hidupnya dan aktivitas produktif koperasi. Kemudian, apabila dilihat dari sisi perbandingan antara koperasi aktif dan tidak aktif di Kota Bandar Lampung, maka dapat dinyatakan bahwa koperasi yang tidak aktif masih mendominasi dari pada koperasi yang aktif di Kota Bandar Lampung, seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Koperasi Kota Bandar Lampung
Tahun 2012 S/D Desember 2016

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	711	717	713	723	740
	Aktif	Unit	509	515	300	313	355
	Tidak Aktif	Unit	202	202	413	410	385
2	Anggota	Orang	98.974	99.994	93.668	94.011	102.088

3	Permodalan						
	- Modal Sendiri	Rp. Miliar	175.483	193.630	217.206	215.977	246.547
	- Modal Luar	Rp. Miliar	273.591	311.989	225.662	248.511	285.481
4	Volume Usaha	Rp. Miliar	435.267	599.049	513.616	560.907	562.868
5	Sisa Hasil Usaha	Rp. Miliar	26.970	27.605	30.421	38.506	30.436

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 1.2 tersebut memberikan penjelasan bahwa jumlah koperasi yang terdapat di Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 sebanyak 740 dengan persentase antara koperasi aktif dan tidak aktif ialah 48 : 52. Maka, dapat dikatakan bahwa total koperasi yang tidak aktif lebih banyak dibandingkan dengan total jumlah koperasi yang aktif. Artinya masih banyak koperasi yang belum terbina dengan baik untuk dapat aktif. Tabel 1.2 juga memberikan keterangan bahwa terjadi penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2016, yang dimana pada tahun 2012 terdapat 509 koperasi yang aktif dan pada tahun 2016 menurun menjadi 355 koperasi yang aktif. Padahal Kota Bandar Lampung memiliki potensi ekonomi wilayah yang besar untuk tumbuh kembangnya koperasi. Karena, Kota Bandar Lampung memiliki berbagai sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan atau dimanfaatkan oleh koperasi sebagai pengembangan usaha. Seperti, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor jasa. Maka, apabila koperasi di Kota Bandar Lampung tidak aktif sebagaimana mestinya, tentunya hal ini menuai pertanyaan besar tentang bagaimana kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

UKM Kota Bandar Lampung dalam rangka menghidupkan dan memberikan pembinaan koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung agar dapat mensejahterahkan anggotanya.

Berkenaan dengan hal di atas, Banyak pihak baik di kalangan akademisi maupun praktisi di bidang perkoperasian menilai bahwa pemerintah belum maksimal mendukung bagi kemajuan koperasi itu sendiri tetapi lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan skala besar baik dari investasi asing atau dalam negeri dengan tujuan mendapatkan pemasukan dari pajak, royalti, atau yang lainnya.¹⁰

Kondisi ini sangat diperlukan perhatian khusus dari berbagai bidang, khususnya di bidang akademisi. Pengkajian mengenai kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan koperasi menjadi sebuah kebutuhan yang secara dinamis harus selalu terpenuhi. Karena semakin bertambahnya waktu, permasalahan yang dihadapi dalam hal meningkatkan daya saing koperasi dalam mensejahterahkan anggotanya semakin kompleks.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jauh tentang kinerja Pemerintah Daerah kaitannya dengan meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi di Kota Bandar Lampung. Untuk itu penulis mengambil judul **“Analisis Kinerja Pemerintah Daerah**

¹⁰ Info Publik, “Koperasi Minim Perhatian” (On-line), tersedia di : <http://infopublik.id/read/41187/koperasi-minim-perhatian.html>, (27 januari 2017).

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)”.

D. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyaknya koperasi resmi di Kota Bandar Lampung yang tidak aktif;
2. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kepada koperasi di Kota Bandar Lampung;
3. Masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi di Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan untuk merumuskan permasalahan penelitian ke dalam bagian-bagian yang lebih jelas agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap subjek/masalah yang diteliti.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota

koperasi. Dari masalah pokok tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi?

F. Batasan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk menjaga agar permasalahan tidak terlalu meluas karena mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, maka pada penelitian ini membatasi ruang lingkup permasalahan.

1. Secara Konseptual

Perlu kiranya penulis membatasi masalah dan ruang lingkup agar penelitian ini lebih terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada : kajian kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dalam bentuk penyelenggaraan berbagai bentuk program pembinaan terhadap koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

2. Secara Kontekstual

Sedangkan secara kontekstual penulis akan melakukan penelitian di Dinas KUKM Kota Bandar Lampung dan Pelaksana Koperasi yang menjadi binaan Dinas KUKM Kota Bandar Lampung.

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar S1 pada Program Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

b. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengembangan kajian tentang bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, khususnya tentang program pendidikan dan

pemberian bantuan modal terhadap koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

c. Manfaat Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan anggota koperasi melalui peningkatan kualitas koperasi itu sendiri.

H. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dalam bentuk penelitian terdahulu menjadi pedoman bagi peneliti untuk memperkaya pengetahuan peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini. Dari berbagai jenis hasil karya ilmiah yang telah peneliti temukan terdapat beberapa perbedaan dalam penyusunan dan pengupasan, khususnya dalam hal fokus dan lokus penelitian yang diteliti. Untuk membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang relevan, maka peneliti meng gambarkannya dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Perbandingan Penelitian

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Wahyuni R. (Universitas Hasanudin, 2013) Jenis Karya	Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustri	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	Deskriptif Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : 1.Wawancara, 2.Observasi,	Strategi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan secara sederhana, strategi dalam pemberdayaan sudah cukup bagus, namun pengimplementasian dari strategi tersebut yang masih perlu dibenahi. Antara Dinas

	Ilmiah : Skripsi	an, dan Perdagangan Kabupaten Sidrap (Studi Kasus : Pemberda- yaan Koperasi Pertanian)	di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberdayak- an Koperasi Pertanian dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris.	3.Dokumen tasi	Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan dan anggota koperasi masih belum terjalin koordinasi yang baik sehingga dalam menjalankan strategi tersebut masih sangat sulit untuk mencapai kata yang optimal. Adapun indikator yang menjadi tolak ukur optimal atau tidaknya strategi tersebut yaitu : 1. Fase inisial, 2. Fase Partisipatoris, 3. Fase Emansipatoris, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan hanya merumuskan strategi tapi belum bisa mengimplementasikan, dan masyarakat juga tidak tahu menahu apa yang menjadi strategi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan.
2.	Anggi Wahid Hidayat (Universitas Sebelas Maret, 2013) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	Pembinaan UMKM Kota Surakarta oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta	Untuk mengetahui Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta	Deskriptif Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : 1.Wawancara, 2.Observasi, 3.Dokumentasi	Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM Kota Surakarta antara lain : 1. Mengadakan Diklat dalam rangka peningkatan SDM 2. UMKM sejenis dikelompokkan sebagai KUB (Kelompok Usaha Bersama) 3. Fasilitas dalam akses permodalan 4. Prioritas Pembinaan UKM yang memproduksi produk unggulan daerah

					5. Validasi data base UMKM 6. Fasilitasi dalam memperoleh HKI dan ijin 7. Melakukan kemitraan
3.	Hilman Abdillah (Universitas Lampung, 2015) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung.	tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung 2. Untuk mengetahui faktor penghambat kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung	Yuridis Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : 1. Studi pustaka (membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan). 2. Studi lapangan (Wawancara).	Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah: 1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, 2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif, 3. Pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah berkeunggulan kompetitif. Faktor penghambat kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah: 1. Keterbatasan anggaran dalam memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. 2. Keterbatasan sumber daya manusia pelaku usaha kecil, yang berdampak pada lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar dan kualitas persaingan usaha yang rendah.
4.	Wungu Amali Ilmi	Strategi Dinas Perdagangan	Penelitian ini bertujuan untuk	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan strategi Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dalam

	(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	an Perindustrian dan Koperasi dalam Pembinaan Koperasi di Kota Serang	mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai strategi yang sebaiknya dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian dan koperasi dalam Pembinaan Koperasi di Kota Serang.	Teknik Pengumpulan Data : 1.Wawancara, 2.Observasi, 3.Dokumentasi	pembinaan koperasi di Kota Serang belum berjalan dengan optimal. Pencapaian strategi yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-faktor dalam penerapan strategi tersebut, adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Serang tersebut terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi yang terdiri dari faktor peluang dan faktor ancaman.
5.	Rian Ramadhana (UIN Raden Intan Lampung, 2017) Jenis Karya Ilmiah : Skripsi	Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung.	Deskriptif Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : 1.Wawancara, 2.Observasi, 3.Dokumentasi	Diharapkan dapat menghasilkan penjelasan tentang kinerja Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung dengan berdasarkan indikator kinerja (menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson), yakni antara lain : 1.Tujuan 2.Standar 3.Alat atau sarana 4.Kompetensi 5.Motif 6.Peluang 7.Umpan Balik Serta, penjelasan dari segi perspektif ekonomi islam.

Sumber : Peneliti, 2017

BAB II

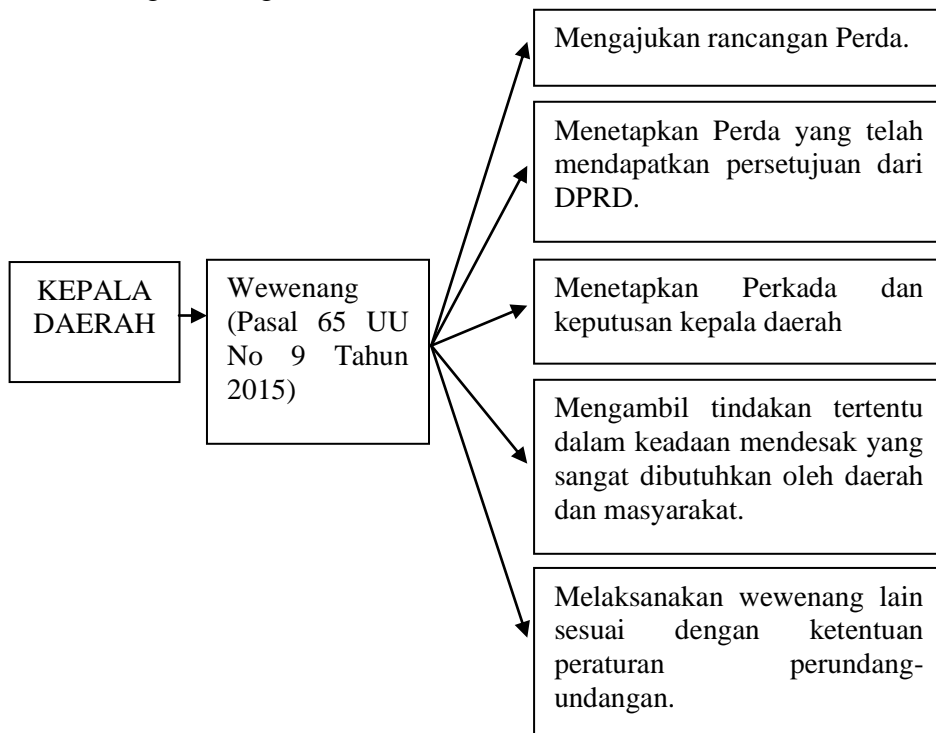
LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹¹

2. Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah

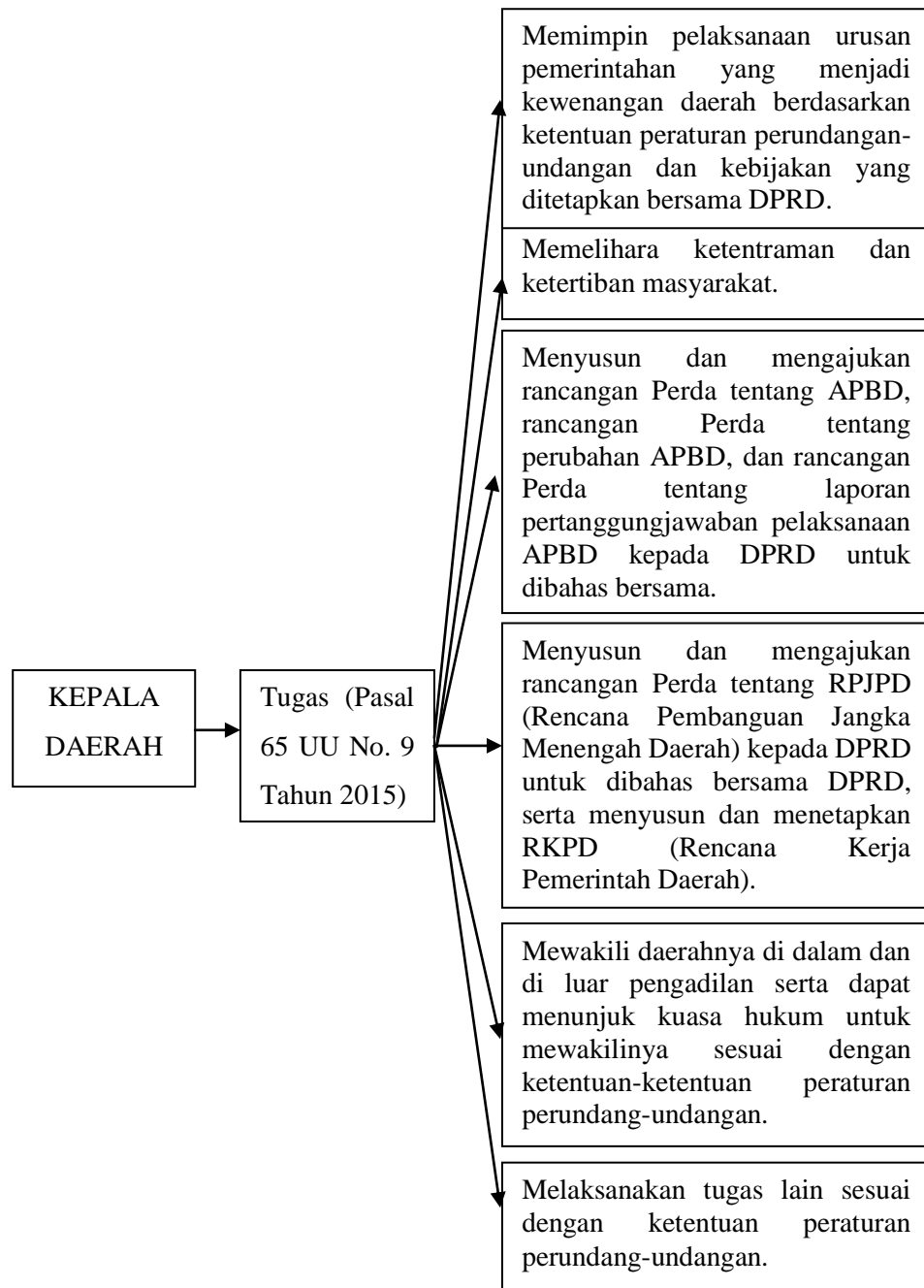


Gambar 2.1

Wewenang Pemerintah Daerah

Sumber : Tim Visi Yustisia, 2015 : 4.

¹¹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bab I, Pasal 1.



Gambar 2.2
Tugas Pemerintah Daerah

Sumber : Tim Visi Yustisia, 2015 : 3.

3. Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Perangkat Daerah, secara formal keberadaannya diatur dalam pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Daerah;
- c. Lembaga Teknis Daerah;
- d. Kecamatan;
- e. Kelurahan.

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.¹²

¹² Dewi Kurniasih, et. al. "Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2016), h. 129.

4. Dinas Koperasi dan UKM

a. Pengertian Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota di bidang koperasi dan UKM berbentuk dinas.¹³

b. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

¹³ Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Menteri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM*, PMKUKM No. 13/Per/M.KUKM/X/2016, Pasal 1.

- 3) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro;
- 4) Pengoordinasian dengan instansi dan lembaga terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.¹⁴

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi sering dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama demi kemanfaatan bersama. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *Cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerja sama”, atau paling tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak dan

¹⁴ Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, *Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021* (Bandar Lampung : Diskopumkm, 2016), hlm. 9.

bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut “*Economic Cooperation*” atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut “*Cooperative Society*”.¹⁵

Berkenaan dengan jati diri koperasi, koperasi dapat diartikan dengan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Definisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang secara sukarela yang mengakui, bahwa anggota yang mempunyai corak ragam yang berbeda dan pada definisi tersebut menekankan ada 4 poin, yaitu :

- 1) Koperasi otonom;
- 2) Berdiri sendiri, sejauh mungkin bebas dari pemerintah dan perusahaan swasta;
- 3) Koperasi adalah perkumpulan orang;
- 4) Berarti bahwa koperasi memiliki kebebasan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilihnya;
- 5) Orang-orang bersatu secara sukarela;

¹⁵ Alifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi “Teori dan Praktik”* (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 15 – 16.

- 6) Keanggotaan tidak boleh merupakan keharusan, anggota harus bebas dalam batas tujuan-tujuan dan sumber daya koperasi, untuk bergabung atau menanggulangi;
- 7) Anggota memiliki kebutuhan yang sama;
- 8) Berarti bahwa koperasi diorganisir oleh anggota-anggota untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan mereka bersama.¹⁶

Agar lebih sempurna pemahaman tentang pengertian koperasi, berikut penulis sajikan beberapa pengertian tentang koperasi,

a. ILO

ILO (*International Labour Organization*) menyatakan pengertian koperasi sebagai berikut :

Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share the risk and benefits of the undertaking.

Definisi ILO ini lebih detail dan berdampak internasional karena organisasi ini merupakan organisasi yang memberikan perhatian terhadap masyarakat golongan bawah. Dalam definisi tersebut, terdapat enam elemen, yaitu :

¹⁶ Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam “Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian, dan permodalan”* (Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2015), h. 1 – 2.

- 1) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*Assosiation of persons*).
- 2) Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (*Voluntarity joined together*).
- 3) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic end*).
- 4) Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of a democratically controlled business organization*).
- 5) Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable contribution to the capital required*).
- 6) Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).¹⁷

b. Dooren

P.J.V. Dooren mengatakan bahwa, tidak ada satu pun pengertian koperasi yang diterima secara umum. Kendati demikian, Dooren masih tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut.

¹⁷ Juliana Lumbantobing, et.al., *Ekonomi Koperasi* (Medan : Univ. HKBP NOMMENSEN, 2002), h. 4.

There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or corporate. Which have voluntarity come together in pursuit of a common economic objective.

Pengertian di atas mencerminkan bahwa dooren sudah memperluas pengertian koperasi, di mana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan badan-badan hukum (*corporate*).¹⁸

c. UU No. 25 Tahun 1992

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan definisi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan”.¹⁹

Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

1) Koperasi adalah badan usaha (*Business Enterprise*)

Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

¹⁸ Alifin Sitio, Halomoan Tamba, Op.Cit., h. 18 – 19.

¹⁹ Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I, Pasal 1.

- 2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi

Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

- 3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”
- 4) Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat

Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

- 5) Koperasi Indonesia “berasaskan kekeluargaan”

Dengan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan diambil seharusnya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaan yang dimaksud adalah

adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkooperasi.

d. Moh. Hatta

Pengertian tentang koperasi yang dikemukakan oleh Moh. Hatta selaku “Bapak Koperasi Indonesia” sedikit berbeda dengan pengertian sebelumnya, yakni lebih sederhana, tetapi menjelaskan bahwa terdapat visi dan misi yang dikandung koperasi. Menurut Moh. Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.²⁰

Adanya koperasi yang hanya mengejar keuntungan atau sisa hasil usaha semata. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut kadang-kadang ditempuh dengan cara yang tidak tepat misalnya dengan menaikkan harga barang dagangan, bahkan kadang-kadang disertai dengan intimidasi, misalnya dengan mengatakan tidak setia kawan bagi yang tidak membeli di koperasi. Hal ini dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap citra koperasi, maka cara seperti

²⁰ Alifin Sitio, Halomoan Tamba, Op.Cit., h. 17 – 19.

ini melanggar prinsip koperasi yang bersifat sukarela.²¹ Karena, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya melainkan melayani kebutuhan masyarakat dan sebagai tempat partisipasi rakyat yang ekonominya lemah. Koperasi tidak identik dengan usaha yang kecil, koperasi dapat membangun usaha yang berskala besar. Modal yang diambil dari para anggota, seperti industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia).²²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi yang secara sadar dan suka rela untuk bersatu dalam rangka memperbaiki kehidupan ekonominya dengan membentuk perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis dan adil.

2. Prinsip-prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain tidak hanya terletak pada dasarnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usahanya. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang

²¹ Harsoyo Y., et. al. *Ideologi Koperasi menatap masa depan* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), h. 19.

²² Herlina Setiyarini dan Wisnu, Op. Cit., h. 221.

dianut oleh koperasi. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik mengenai hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antar sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi, serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi mengatur pula pola pengelolaan usaha koperasi.

Banyak tokoh koperasi dari berbagai negara yang telah merumuskan prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi, rumusan prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berlaku untuk semua negara karena setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Hal ini menyebabkan terdapatnya beragam prinsip koperasi di seluruh dunia.

Mengingat keadaan ini maka Gabungan Koperasi Internasional (ICA), mengambil inisiatif untuk merumuskan prinsip-prinsip yang dapat berlaku umum. Dalam kongres ICA ke-23 yang berlangsung di Wina pada tahun 1966 menghasilkan rumusan baru prinsip-prinsip koperasi.²³ Rumusan prinsip tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Prinsip Koperasi menurut ICA

No.	Prinsip-prinsip Koperasi
1.	Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka

²³ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2015), h. 33 –

2.	Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis
3.	Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya
4.	Sisa hasil usaha jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota
5.	Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap masyarakat pada umumnya
6.	Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat provinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerja sama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional maupun internasional

Sumber : Revrisond Baswir, 2015 : 37 – 38.

3. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Pada dasarnya tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah kerja koperasi bersangkutan. Ini bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang memperkenankan koperasi tumbuh di negaranya.²⁴ Lebih jauh, dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa,

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁵

²⁴ Juliana Lumbantobing, et.al., Op.Cit., h. 24.

²⁵ Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab II, Pasal 3.

Tujuan yang jelas akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Paling tidak pihak manajemen dapat mencapai tujuan-tujuan sementara koperasi yang dikelolanya. Tujuan sementara tersebut biasanya berkaitan erat dengan jenis koperasi. Tujuan sementara koperasi produksi adalah untuk memberikan jasa pada anggota-anggota dengan harga yang sama atau bahkan, jika mungkin, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Berbeda dengan koperasi konsumsi, tujuan koperasi konsumsi adalah berusaha memberi jasa kepada anggota-anggotanya dengan menjual barang-barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah, sedangkan koperasi kredit mempunyai tujuan memberikan kredit bagi anggota-anggota koperasi bersangkutan dengan persyaratan yang relatif mudah.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, yaitu koperasi memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, berarti program utama koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan usaha. Tujuan umum tersebut di atas bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif. Ukuran kesejahteraan bagi orang yang satu dengan orang yang lain dapat berbeda karena dipengaruhi oleh sikap manusia yang pada dasarnya tidak pernah merasa puas. Manusia akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraannya, termasuk anggota-anggota koperasi.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dijalankan melalui koperasi. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil²⁶. Apabila pendapatan riil seseorang atau segolongan masyarakat meningkat, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan (dari sudut pandang ekonomi) orang atau masyarakat bersangkutan meningkat pula. Sehubungan dengan itu, apabila tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya berarti peningkatan pendapatan riil anggota menggambarkan keberhasilan koperasi mencapai tujuannya. Dengan kata lain berhasil tidaknya koperasi mencapai tujuannya dapat diukur dari pendapat riil anggotanya. Pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang dapat dibeli dari pendapatan nominalnya. Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, *ceteris paribus*, maka orang yang bersangkutan akan lebih

²⁶ Pendapatan Riil (*Real Income*) adalah pendapatan individu, kelompok atau negara yang disesuaikan untuk perubahan dalam daya beli yang diakibatkan oleh inflasi. Untuk menentukan perbedaan antara daya beli, misalkan, satu dollar, di tahun dasar dan daya beli dollar sekarang digunakan suatu indeks harga, faktor persentase yang dihasilkan dan diterapkan pada pendapatan total menghasilkan nilai dari pendapatan tersebut dalam dolar konstan, yang dinamakan pendapatan riil. Sebagai contoh, bila harga suatu keranjang meningkat dari 100 dollar menjadi 120 dollar dalam sepuluh tahun, yang mencerminkan penurunan 20 persen dalam daya beli, maka gaji harus naik 20 persen bila ingin mempertahankan pendapatan riil. Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2003), h. 179.

mampu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Itu berarti tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan meningkat pula.

Selain tujuan koperasi, UU No. 25 tahun 1992 menyatakan juga fungsi koperasi untuk Indonesia. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 4, fungsi koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁷

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi.

²⁷ Juliana Lumbantobing, et.al., Op. Cit., h. 24 – 27.

Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.²⁸

Secara sederhana definisi kinerja atau *performance* dapat dikemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan atau sekelompok karyawan dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang disebabkan oleh motivasi dan kemampuannya serta manajemen memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk dapat bekerja secara optimal.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan.³⁰ Menurut Simanjuntak, Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam hal ini mencakup kinerja individu,

²⁸ Bagus Mohamad Ramadhan, “Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun”. *JESTT*, Vol. 2 No. 4 (Juli 2015), h. 275

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kinerja>, (25 desember 2017).

kinerja kelompok, kinerja perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern.³¹

Pengertian kinerja atau *performance* menurut Moeheriono merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang diterapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya.³²

Menurut sedarmayanti , kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya).³³ Di sisi lain ahuya menjelaskan bahwa,

³¹ Hadi nur, *Proceedings : Integrating With Science and Religion* (Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2014), h. 375.

³² Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, dikutip dalam Muklis Kanto dan Patta Rapanna, *Filsafat Manajemen*, Celebes Media Perkasa, Makassar, 2017, h. 171.

³³ Saban Echdar, *Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Pengembangan Human Capital : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik di Indonesia*, Makalah the 1 st symposium on integrating knowledge (The 1 st ASIK), Universiti Teknologi Malaysia, 20 juni 2014, hlm. 375

*“Performance is the way of job or task is done by an individual, a group of an organization.”*³⁴

[“Kinerja adalah cara perseorangan atau kelompok dari suatu organisasi menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas.”]

Menurut Morf kinerja merupakan hasil penjumlahan atau fungsi dari motivasi dan kemampuan. Sehingga motivasi dan kemampuan sebagai kompetensi. Motivasi berkenaan dengan penciptaan kemauan kerja, maka kinerja yang diharapkan tidak akan tercapai. Begitu pula sebaliknya, walau seseorang mempunyai kemauan kerja tetapi tanpa kemauan kerja, maka kinerja yang diharapkan juga tidak akan tercapai. Sehingga, Keduanya menjadi unsur utama bagi terciptanya kinerja yang diharapkan.³⁵

Menurut Seymour, Kinerja merupakan tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang dapat diukur.³⁶ Menurut Stephen P. Robbins,

³⁴ B. N. Ahuya, Dictionary of Management, dikutip dalam I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik : Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 40 – 41.

³⁵ Sanusi Hamid, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan* (Yogyakarta : Deeppublish, 2014), h. 111.

³⁶ Muhammad A.S. Hikam, *Kinerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Industri* (Jakarta : PEP-LIPI, 1997), h. 2.

kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.³⁷

Dengan demikian, pengertian atau kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil karya yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2. Indikator Kinerja

Menurut Indra Bastian, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia,

³⁷ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior : Concepts, Controversies, and Applications*, dikutip dalam I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik : Konsep, Praktik, dan Studi Kasus* (Jakarta : Salemba Empat, 2008), h. 40.

informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.³⁸

Menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson terdapat tujuh indikator kinerja, yaitu :

- a. Tujuan, merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

³⁸ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* (Jakarta : Erlangga, 2005), h. 267.

- b. Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.
- c. Alat atau sarana, merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.
- d. Kompetensi, merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. Motif, merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan

- termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan yang mengakibatkan disinsentif.
- f. Peluang, pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.
 - g. Umpan balik, antar tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan tujuan yang diidentifikasi oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.³⁹

3. Kinerja dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kerja mempunyai etika yang harus selalu diikutsertakan di dalamnya, karena kerja merupakan bukti adanya iman dan parameter bagi pahala dan siksa. Hendaknya para pekerja dapat meningkatkan tujuan akhirat dari pekerjaan yang mereka lakukan, dalam arti bukan

³⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 86.

sekedar memperoleh upah dan imbalan, karena tujuan utama kerja adalah demi memperoleh keridhoan Allah *Ta'ala* sekaligus berkhidmat kepada umat. Etika bekerja yang disertai dengan ketakwaan merupakan tuntunan Islam.

1. Mengimplementasikan ketakwaan dalam bekerja

Pekerja harus memiliki komitmen terhadap agamanya, memiliki motivasi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan selalu memperbaiki muamalah nya. Di samping itu, mereka harus mengembangkan etika yang berhubungan dengan masalah kerja sehingga menjadi suatu tradisi kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Cara seperti ini mempunyai dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Akhlak Islam tidak tergantung pada manusia bekerja atau tidak bekerja, namun akhlak Islam lahir dari akidah Islam, konsisten pada ajaran-ajaran Islam serta bertalian dengan halal dan haram.

2. Tanggung jawab terhadap pekerjaan

Sikap ini muncul dari iman dan rasa takut individu terhadap Allah *Azza wa Jalla*. Kesadaran ketuhanan dan spiritualitas nya mampu melahirkan sikap-sikap kerja positif. Kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun, serta akan menghitung seluruh amal perbuatannya secara adil. Kemudian akan

membalasnya dengan pahala atau siksaan di dunia. Allah *Ta'ala* berfirman :

قَيِّمٌ ۝۱ لِّيُنْذِرَ بَأْسَ ۝۱ شَدِيدٍ ۝۱ مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ۝۱ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ۝۱ الصَّالِحَاتِ ۝۱ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝۲ ۱

Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik". (Q.S. Al-kahfi/18 : 2).

3. Berusaha dengan cara halal dalam seluruh jenis pekerjaan

Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasallam* pernah ditanya tentang yang paling utama. Beliau menjawab,

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ⁴⁰

Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (diberkahi). (H.R. Ahmad no. 141)

4. Bekerja secara profesional (ahli)

Aspek Profesionalisme ini sangat penting bagi seorang pekerja. Maksudnya adalah kemampuan untuk memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prinsipnya (keahlian). Pekerja tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat amanah, kuat, berakhlak dan bertakwa, namun harus mengerti dan menguasai benar pekerjaannya. Terkait perkara ini Rasulullah *Shalallahu'alaihiwasallam* pernah bersabda,

⁴⁰ Abu Abdillah Ahmad, *Musnad Al kabir*, (Beirut : Muassasah Ar Risalah, 2001), h. 157.

إِذَا أُسْدِ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ⁴¹

Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. (H.R. Bukhari no. 6015)

Jadi, apabila tidak ada profesionalisme atau keahlian, suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan. Juga menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas produksi, bahkan sampai pada kesemrawutan manajemen. Hal-hal ini tentunya jelas akan menyebabkan terjadinya kebangkrutan total yang tidak diinginkan.⁴²

Menurut Qardhawi menjelaskan bahwa agama Islam memandang bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seorang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah *Ta'ala*, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah nya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar.

Berdasar cara pandang agama Islam tergambar bahwa orientasi kinerja tidak hanya untuk memaksimalkan laba semata seperti penggunaan pada metode penilaian kinerja konvensional, tetapi

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari : Al Ilmu*, (Kairo : Al Mathba'ah As Salafiyyah, 1979), Bab: Barangsiapa Yang Ditanyai Tentang Suatu Ilmu, h. 37.

⁴² Ahmad Zarkasyi, "Manajemen Kinerja dalam Tafsir Al-Qur'an dan Hadist Pendekatan Filsafat Tematik". *Jurnal Qolamuna*, Vol. 2 No. 1 (Juli 2016), h. 145 – 148.

orientasi kinerja perlu meliputi dimensi yang lebih luas dan menyeluruh, yakni kesejahteraan para *stakeholder* meliputi investor, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, lingkungan/sosial dan generasi yang akan datang.⁴³

D. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).⁴⁴ Dalam teori umum, sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta yakni *catera* yang berarti payung. *Catera* adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai.

⁴³ Bagus Mohamad Ramadhan, *Loc.Cit.*, 280 – 281.

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Kemdikbud RI, 2008), h. 1284.

Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.⁴⁵

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk menghantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*fallah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah at-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁴⁶

Menurut P3EI (Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam) UII, Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

⁴⁵ Agung Eko Purnama, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11 No. 1 (Januari – Juni 2014), h. 26.

⁴⁶ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 388.

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*Fallah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Kesejahteraan dalam pandangan ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.⁴⁷

⁴⁷ Ziauddin Sardar, "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 5 (Mei 2016), h. 394 – 395.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil 'alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-qu'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah *Ta'ala* jika manusia melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya.⁴⁸

Ayat-ayat Al-qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

1. Q.S. Quraaisy ayat 3 – 4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَءَامَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ ۚ

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Berdasarkan ayat di atas, terdapat penjelasan bahwa indikator kesejahteraan Al-qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

⁴⁸ Almizan, "Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 74

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Allah *Ta'ala* yang memberi manusia makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai dengan anjuran Allah *Shubhana wa Ta'ala* dalam surat Quraaisy di atas.

Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, dengan kata lain masyarakat belum mendapat kesejahteraan.⁴⁹

2. Q.S. An-nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah *Ta'ala* yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah *Azza wa Jalla* juga akan membahas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya.

Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, tenang, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk di dalamnya, mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

⁴⁹ Amirus Shodiq, *Op.Cit.*, h. 390 – 391.

3. Q.S. An-nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمْ دُرِّيَّةً ۖ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketakwaan kepada Allah *Ta'ala* dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah *Ta'ala* meminta kepada hamba-hamba Nya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat ketakwaan nya kepada Allah *Ta'ala*.⁵⁰

Pada ayat di atas Allah *Ta'ala* juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlak mulia.⁵¹

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan

⁵⁰ Almizan, *Op.Cit.*, h. 74 – 75.

⁵¹ Amirus Shodiq, *Op.Cit.*, h. 391 – 392.

penjelasan dari kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, maka dalam penelitian ini dibuatkan lah kerangka pemikiran. Sehingga dengan adanya kerangka pemikiran ini, baik peneliti maupun pembaca mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Menurut sugiyono, menyatakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵²

Oleh karenanya peneliti berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka pemikiran. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada terkait kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota diantaranya :

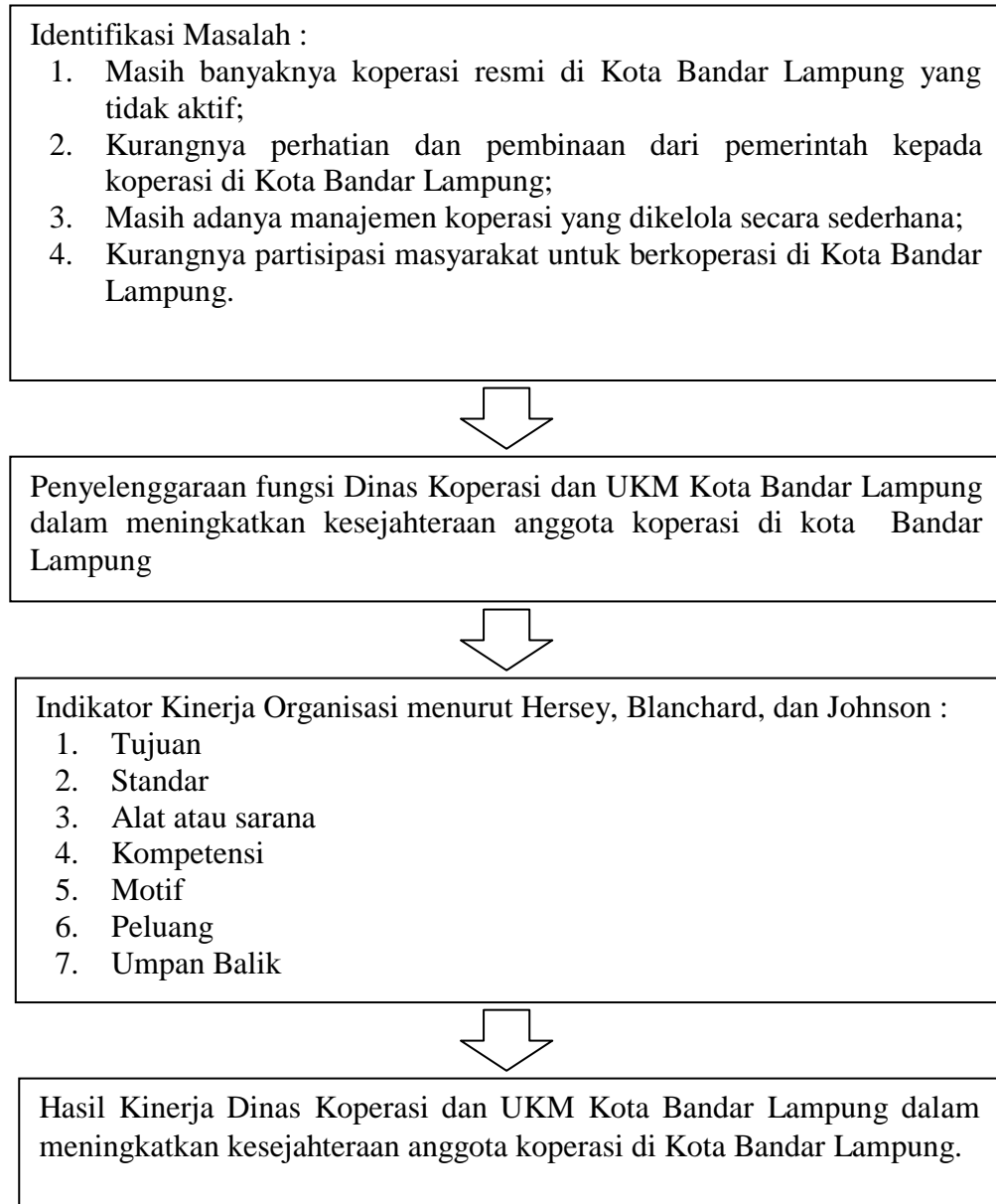
5. Masih banyaknya koperasi resmi di Kota Bandar Lampung yang tidak aktif;
6. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kepada koperasi di Kota Bandar Lampung;
7. Masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana;
8. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi di Kota Bandar Lampung.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 60.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka kiranya dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Di bawah ini akan dikemukakan mengenai indikator kinerja yang menjadi titik acuan untuk mengetahui kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan menggunakan indikator kinerja organisasi menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson, yaitu :

1. Tujuan;
2. Standar;
3. Alat atau sarana;
4. Kompetensi;
5. Motif;
6. Peluang;
7. Umpan Balik.

Indikator kinerja organisasi yang telah disebutkan di atas, dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Sumber : Peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Antara No. 42, Kelapa Tiga, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penentuan lokasi ini dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan Instansi/Dinas yang menjadi perwakilan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki fungsi dan wewenang terkait pembinaan Koperasi di Kota Bandar Lampung,

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁵³

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 9.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif (*descriptive research*). Pendekatan deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai “apa fenomena yang diteliti”. Penelitian deskriptif tidak berupaya menjelaskan hubungan antara gejala sosial dengan gejala sosial yang lain.⁵⁴

D. Variabel Penelitian

1. Definisi Konsep

Variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, organisasi pelayanan publik yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah atau Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Sehingga peneliti menentukan teori yang dapat menguji kinerja dari organisasi pelayanan publik tersebut berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada tahap observasi lapangan. Berdasarkan permasalahan di lapangan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan teori indikator kinerja menurut Hersey, Blanchard dan Johnson, untuk mengetahui kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam

⁵⁴ Nanag Martono, *Metode Penelitian Sosial “Konsep-konsep kunci”* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 197.

meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung.

Indikator kinerja tersebut, yaitu :

- a. Tujuan;
- b. Standar;
- c. Alat atau sarana;
- d. Kompetensi;
- e. Motif;
- f. Peluang;
- g. Umpan Balik.

Dari ketujuh indikator tersebut dapat dijabarkan kedalam sub indikator yang kemudian dijadikan pertanyaan-pertanyaan pada instrumen penelitian untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung.

2. Definisi Operasional

Penelitian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung ini, yang menjadi variabel adalah kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Teori yang digunakan adalah indikator kinerja menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka

setiap indikator teori akan dijadikan pertanyaan pada instrumen penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, melihat kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Subyek Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini tidak menggunakan populasi, karena berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan

responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi, karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut.⁵⁵

Subyek informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang mengetahui tentang kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih, ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.

Metode penentuan subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel. Dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya informan tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis

⁵⁵ Sugiyono, Op. Cit., h. 216.

harapkan, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁵⁶

Adapun subyek penelitian yang akan penulis ambil sebagai sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Status Informan
1.	Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	
a.	Ahmad Imron, S.H	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
b.	Filma Mega, S.E., M.Esy	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi
c.	Bertiliala Utari, S.E.	Staff Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
d.	Ratnawati, S.E.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan
f.	Suhartati Maimunah, S.H.	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
g.	Jaka Prima	Staff Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
h.	M. Haniefan Muslim, S.I.Kom	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan
2.	Koperasi Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	
a.	Miftahudin	Marketing Manager KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU)
b.	Abu Bakar Nata M. Kamil, S.E.	Ketua Pengurus Koperasi Tani Jaya Makmur Mandiri

⁵⁶ Sugiyono, Op. Cit., h. 218 – 219.

c.	Mashudi	Sekretaris Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya
d.	Dusra Hayadi, S.E.	Manager Koperasi Pedagang Masyarakat Sejahtera
e.	Alam Munzir, S.Sos	Manager Koperasi Pilar Utama Telkom
f.	Acep Maulana, S.E.	Manager Koperasi Karyawan (KOPKAR) Tower
3	Stakeholder	
a.	Agus Nadi	Pengurus Dekopinda Kota Bandar Lampung

Sumber : Peneliti, 2017

G. Metode pengumpulan data

a. Metode Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu, Good Akta mengemukakan ciri-ciri pengamatan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Mempunyai arah yang khusus.
- b. Sistematis.
- c. Bersifat kuantitatif.
- d. Diikuti pencatatan segera (pada waktu observasi berlangsung).
- e. Menuntut keahlian.
- f. Hasilnya dapat dicek dan dibuktikan.⁵⁷

⁵⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), h. 70 – 71.

Metode ini digunakan peneliti untuk mengamati keadaan langsung dari proses kinerja Pemerintah Daerah, dalam hal ini ialah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terkait peningkatan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung. Sehingga, menjadi data yang akan mendukung untuk mengungkap permasalahan yang terjadi.

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah proses pengumpulan data dengan maksud untuk menyelidiki persepsi dan perspektif berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan publik. Hal itu dilakukan dengan cara mengorganisir bentuk wawancara dengan sedemikian rupa untuk meliputi topik yang diminati, sekaligus menggerakkan diskusi ke arah yang diinginkan dengan mengajukan sebagian besar pertanyaan. Secara sederhana, wawancara diartikan sebagai saluran untuk mentransmisikan pengetahuan dari informan pada pewawancara.⁵⁸

Metode wawancara sangat ditekankan pada penelitian ini karena metode ini sangat berkecapan sekali di dalam penelitian dan dapat mengorek keterangan dengan jelas apa yang akan diketahui dari informan. Data yang diperoleh adalah informasi mengenai bagaimana proses kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta faktor-faktor yang

⁵⁸ Christine Daymon, Immy Holloway, *Qualitative Reseacrh Methods in Public Relations and Marketing Communications*, terjemahan Cahya Wiratama (Yogyakarta : Penerbit Bentang, 2008), h. 258 – 259.

menjadi kendala dalam menjalankan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara bebas dan sistematis, yang dimaksud bebas adalah tanpa menggunakan teks namun secara sistematis agar wawancara tidak keluar dari alur penelitian, sehingga penelitian menjadi fokus terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Kelebihan dari metode ini ialah apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.⁵⁹

Adanya penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti dapat melihat dengan baik apa yang ada di dalam alur penelitiannya. Dan adapun metode ini digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian, profil instansi, struktur organisasi, visi dan misi, keadaan karyawan, sarana dan prasarana, serta informasi dokumen Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data harus memenuhi tiga hal, yaitu : 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat

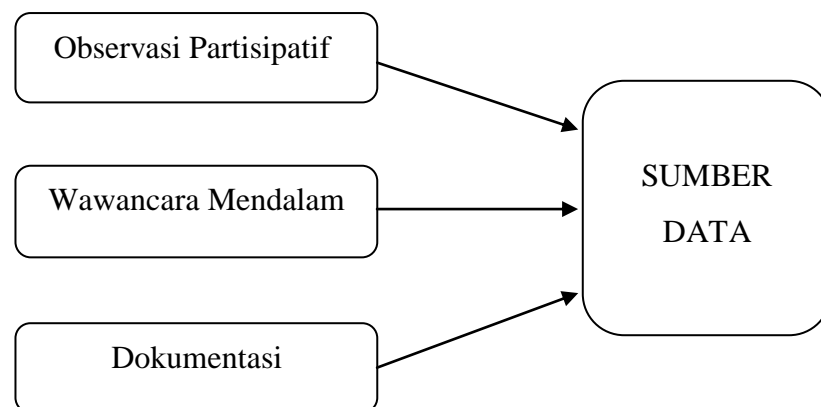
⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 274.

diterapkan, 3) Memperbolehkan keputusan dari luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yakni :

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti melakukan pengecekan data dengan sumber yang sama tetapi metode yang berbeda. Dari hasil wawancara, penulis cocokkan dengan observasi dan dokumentasi.

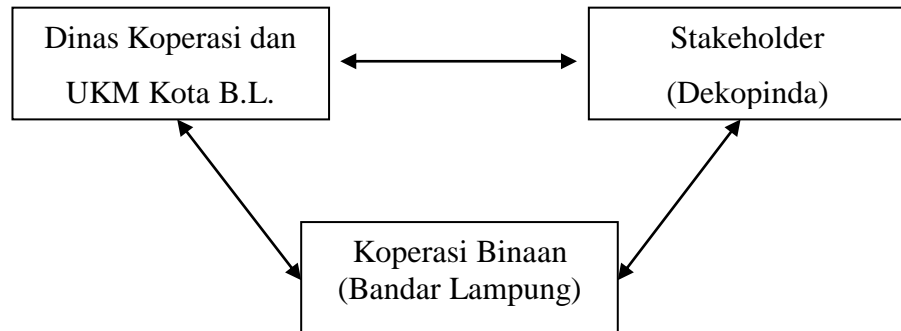


Gambar 3.1
Triangulasi Teknik

Sumber : Sugiyono, 2014 : 242.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber.⁶⁰



Gambar 3.2
Triangulasi Sumber

Sumber : Peneliti, 2017.

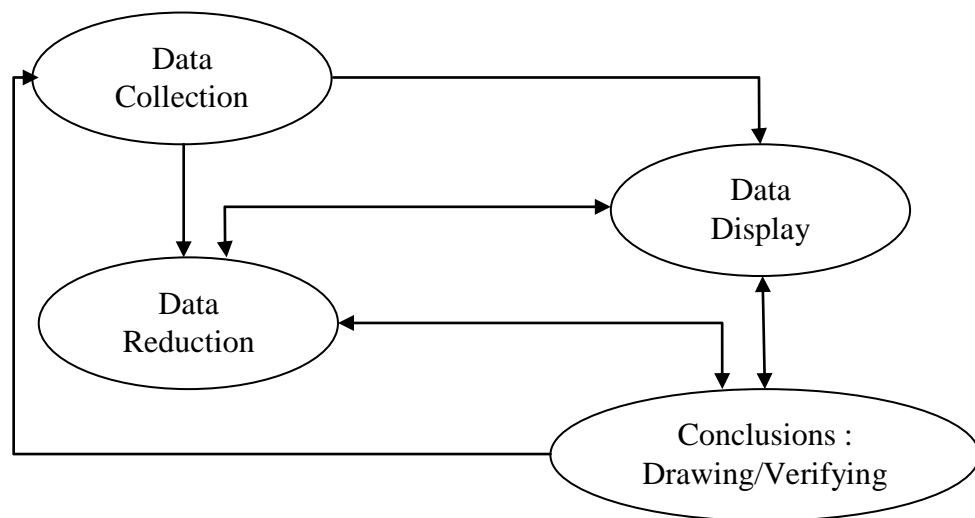
I. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikannya.⁶¹

⁶⁰ Sugiyono, Op. Cit., h. 273 – 274.

⁶¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 141.

Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis yang akan peneliti gunakan tersebut ditunjukkan pada gambar 3.3 berikut :



Gambar 3.3
Analisis Data

Sumber : Sugiyono, 2014 : 247.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang akan didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu direduksi data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir data digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian) proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir tersusun lengkap.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah *data display*. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶²

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

⁶² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), h. 409.

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶³

⁶³ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung
 - a. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

Pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan rangkaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam rangka menetapkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung, diperlukan visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh *stakeholders*) dalam memantapkan peran masing-masing dalam membangun Kota Bandar Lampung. Adapun Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu : **“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”**. Dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan program prioritas dalam mengalokasikan sumber daya daerah, maka

ditetapkanlah misi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yakni sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
- 3) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
- 4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan;
- 5) Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah;
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.⁶⁴

b. Kondisi Geografis dan Administratif Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, kondisi geografis dan administratif Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut, secara geografis Kota Bandar Lampung terletak 5020° sampai dengan 5030° lintang selatan dan 105028° sampai dengan 105037° bujur timur. Ibukota Bandar Lampung

⁶⁴ Pemerintah Kota Bandar Lampung, “Visi dan Misi Kota Bandar Lampung”. (On-line), tersedia di <https://bandarlampungkota.go.id/>, (9 Desember 2017).

berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 KM²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM².

Secara administrasi, Kota Bandar Lampung berbatasan dengan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Lampung, yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 126 kelurahan, rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Tanjung Karang Pusat	7
2	Tanjung Karang Timur	5
3	Tanjung Karang Barat	7

4	Kedaton	7
5	Rajabasa	5
6	Tanjung Senang	7
7	Sukarame	6
8	Sukabumi	7
9	Panjang	7
10	Teluk Betung Selatan	6
11	Teluk Betung Barat	5
12	Teluk Betung Utara	6
13	Kemiling	9
14	Teluk Betung Timur	6
15	Enggal	6
16	Bumi Waras	6
17	Way Halim	6
18	Kedamaian	7
19	Labuhan Ratu	6
20	Langkapura	5
JUMLAH		126

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2017, diolah peneliti.

Selain itu Kota Bandar Lampung memiliki 2 (dua) buah pulau, yaitu Pulau Pasaran dan Pulau Kubur. Pulau Pasaran secara administrasi masuk dalam wilayah Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan sedangkan Pulau Kubur masuk dalam Kecamatan Teluk Betung Barat. Berbeda dengan Pulau Pasaran yang merupakan salah satu wilayah padat serta merupakan sentra industri

pengolahan ikan, Pulau Kubur merupakan pulau tidak berpenghuni yang difungsikan sebagai kawasan konservasi.⁶⁵

2. Gambaran Umum Perkembangan Koperasi di Kota Bandar Lampung

Jumlah koperasi di Kota Bandar Lampung pada Desember 2016 mengalami penambahan koperasi baru sebanyak 17 unit. Pembubaran Nihil, sehingga jumlah Koperasi di Bandar Lampung bertambah menjadi 740 unit. Jumlah Koperasi tersebut memiliki rincian antara lain jumlah koperasi aktif sebanyak 355 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 385 unit. kriteria koperasi aktif antara lain : aspek kelembagaan aktif (Memiliki Anggota, Pengurus dan Pengawas serta melaksanakan RAT) serta aspek usaha dan kemitraan berjalan baik hanya sebanyak 88 unit. Kriteria kondisi koperasi tidak aktif secara umum antara lain : Pengurus dan Pengawas ada sebagian, Anggota tidak ditemukan/ada sebagian, Rapat Anggota tidak berjalan minimal selama 2 tahun berturut-turut, kantor dan alamat tidak ditemukan dan Usaha tidak berjalan.

Koperasi menurut jenis usaha dapat dibagi sebagai berikut : 566 unit untuk jenis simpan pinjam, 8 unit untuk jenis kerajinan, 135 unit untuk jenis distribusi dan 31 unit untuk jenis jasa.

Berdasarkan penilaian terhadap koperasi yang berprestasi pada tahun 2015 terdapat sebanyak 15 (lima belas) koperasi yang berprestasi

⁶⁵ BPS Kota Bandar Lampung, "Kondisi Geografis dan Administratif". (On-line), tersedia di <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>, (9 Desember 2017).

di tingkat Kota Bandar Lampung. Penjelasan tentang koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Perkembangan Koperasi Kota Bandar Lampung
Tahun 2012 S/D Desember 2016

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	711	717	713	723	740
	Aktif	Unit	509	515	300	313	355
	Tidak Aktif	Unit	202	202	413	410	385
2	Anggota	Orang	98.974	99.994	93.668	94.011	102.088
3	Permodalan						
	- Modal Sendiri	Rp. Milyar	175.483	193.630	217.206	215.977	246.547
	- Modal Luar	Rp. Milyar	273.591	311.989	225.662	248.511	285.481
4	Volume Usaha	Rp. Milyar	435.267	599.049	513.616	560.907	562.868
5	Sisa Hasil Usaha	Rp. Milyar	26.970	27.605	30.421	38.506	30.436

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.3
Perkembangan Koperasi Baru
di Kota Bandar Lampung tahun 2012 – 2016

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi baru	Unit	12	6	13	10	17

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.4
Perkembangan Koperasi Menurut Jenis Usaha
di Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2016

Tahun	Jenis Usaha							
	Simpan Pinjam		Kerajinan		Distribusi		J a s a	
	Unit	Nilai (Milyar)	Unit	Nilai (Milyar)	Unit	Nilai (Milyar)	Unit	Nilai (Milyar)
3	539	387.563	8	1,227	124	25.225	28	10.062
2012	546	398.753	8	1,227	128	25.226	29	10,062
2013	552	553.395	8	1.227	128	34.020	29	10.407
2014	548	468.914	8	1.227	129	32.706	28	10.767
2015	557	509.825	8	1.227	128	38.975	30	10.881
2016	566	498.022	8	1.227	135	29.333	31	14.490

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.5
Daftar Nama Koperasi Berprestasi
Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional

NO	JENIS PRESTASI/ PENGHARGAAN	INSTANSI / KEMENTRIAN KK / LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN	NO. PIAGAM
1	Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010		
	a. KPRI Karya Sehat	Kemenkop dan UKM RI	SK. No. 19/Kep/M.KUMKM/VII/2010

	a. Koperasi Baitut Tamwil Muhamadiyah	Kemenkop dan UKM RI	SK. No. 19/Kep/M.KUMKM/VII/2010
2	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2010		
	a. KPRI Karya Sehat	Pemprov Lampung	Juli 2010
	b. Koperasi Baitut Tamwil Muhamadiyah	Pemprov Lampung	Juli 2010
	c. Kopkar Budi Bhakti	Pemprov Lampung	Juli 2010
	d. KSP Kopdit Sejahtera	Pemprov Lampung	Juli 2010
	e. KPRI Warga Teknologi	Pemprov Lampung	Juli 2010
	f. KSU Makmur Sejahtera	Pemprov Lampung	Juli 2010
3	Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011		
	a. KPRI Saptawa	Kemenkop dan UKM RI	22/Kep/M.KUKM/VII/2011
	b. Kopkar Sairasan	Kemenkop dan UKM RI	22/Kep/M.KUKM/VII/2011
4	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2011		
	a. KPRI Saptawa	Pemprov Lampung	002/6/2008/III.11/2011
	b. KPRI Melati	Pemprov Lampung	002/6/2008/III.11/2011
	c. Kopkar Sairasan	Pemprov Lampung	002/6/2008/III.11/2011
	d. Kopegtel	Pemprov Lampung	002/6/2008/III.11/2011
	e. Kopkar Kekar PT. Pelindo	Pemprov Lampung	002/6/2008/III.11/2011
5	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2013		
	a. Kopel Bulog Divre Lampung	Pemprov Lampung	No. G/ /III.11/HK/2013
	b. Primkop Garuda Hitam	Pemprov Lampung	No. G/ /III.11/HK/2013

	c. KSU Makmur Sejahtera	Pemprov Lampung	No. G/ /III.11/HK/2013
	d. Kopkar Budi Bhakti	Pemprov Lampung	No. G/ /III.11/HK/2013
	e. Kopwan Anggrek Bulan	Pemprov Lampung	No. G/ /III.11/HK/2013
6	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2014		
	a. KPRI Handayani	Pemprov Lampung	No. G/808/III.11/HK/2014
	b. Primkoppabri	Pemprov Lampung	No. G/808/III.11/HK/2014
	c. KPRI RRI	Pemprov Lampung	No. G/808/III.11/HK/2014
7	Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015		
	a. KPRI Ragom Gawi	Kemenkop dan UKM RI	SK. No. 11/Kep/M.KUKM/VI/2015
8	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2015		
	a. Koperasi BMT Syariah Makmur	Pemprov Lampung	G/393/III.11/HK/2015
	b. KPN Melati	Pemprov Lampung	G/393/III.11/HK/2015
9	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2016		
	a. Koperasi Bulog Divre Lampung	Pemprov Lampung	G/587/III.11/HK/2016
	b. Kopdit Sejahtera	Pemprov Lampung	G/587/III.11/HK/2016
	c. KPRI Handayani	Pemprov Lampung	G/587/III.11/HK/2016

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

3. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

a. Sejarah Singkat dan Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.

Sesuai dengan PERWALI (Peraturan Walikota) Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
- b) Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d) Pengkoordinasian dengan instansi dan lembaga terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan UKM meliputi Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat dinas;
- b) pengelolaan urusan program dan informasi;
- c) pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- d) pengelolaan urusan keuangan;
- e) pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas dinas;
- f) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelembagaan dan pengawasan meliputi kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan serta pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi pendaftaran Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana serta penyuluhan perkoperasian;
- b) Pelaksanaan pembinaan pendirian dan pembubaran Koperasi;
- c) Pelaksanaan layanan Badan Hukum Koperasi dan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan;
- d) Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu;
- e) Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
- f) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan dan pengawasan meliputi kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan serta pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- g) Pengoordinasian dengan instansi dan lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan penguatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha, peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;;
- b) Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi;
- c) Pengoordinasian dengan instansi terkait dan lembaga usaha lainnya dalam rangka fasilitasi pengembangan pola kemitraan koperasi, seperti perbankan, LPDB, Lembaga penjamin kredit, dan lembaga lainnya.

- d) Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan melibatkan peran serta masyarakat, organisasi profesi dan lembaga pendidikan;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata kelola Koperasi serta standarisasi dan sertifikasi SDM Koperasi;
- f) Penyiapan bahan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pembinaan, pemberdayaan pengembangan usaha Koperasi;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi usaha mikro, dengan

pendampingan usaha terpadu, pemasaran - jaringan usaha, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pengembangan kelembagaan dan tata kelola usaha mikro, serta kemitraan, penjamin kredit dan izin usaha lainnya;

- b) Penyiapan pedoman pembinaan dan pengembangan usaha mikro
- c) Penyiapan fasilitasi pengembangan kemitraan dengan lembaga pembiayaan usaha mikro, seperti perbankan, LPDB, Lembaga penjamin kredit, dan lembaga lainnya;
- d) Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi, pengembangan kelembagaan dan tata kelola usaha mikro serta penumbuhan wira usaha baru, serta mengaktifkan peran serta masyarakat dalam usaha pemberdayaan usaha mikro;
- e) Penyiapan laporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

1) Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Visi merupakan pandangan jauh ke depan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi di masa depan, disusun dengan mempertimbangkan, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta memperhatikan keinginan *stakeholders*.

Berdasarkan hal tersebut, maka visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah *“Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung yang berkualitas dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan”*.

2) Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan program prioritas dalam mengalokasikan sumber daya daerah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merumuskan tiga misi, yaitu :

- a) Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing.
- b) Mewujudkan Perdagangan yang berkualitas dan berdaya saing.
- c) Mewujudkan Industri yang berkualitas dan berdaya saing.
- d) Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

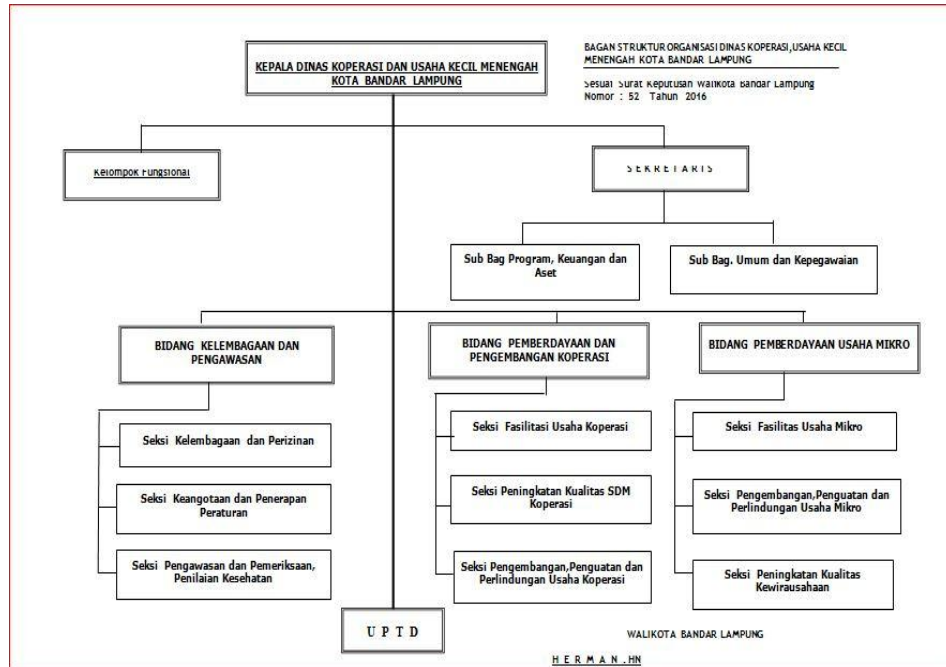
c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, ialah sebagai berikut :

- 1) Walikota/Wakil Walikota

- 2) Kepala Dinas : Drs. Girendra, M.M.
- 3) Sekretariat : Mutiah M. Aliun, S.E., M.M.
- 4) Kasubag Umum dan Kepegawaian : Ahmad Mirza, S.Sos.
- 5) Kasubag Keuangan dan Perencanaan : Dra. Paula Sari
- 6) Kabid Kelembagaan dan Kepegawaian : Yuliarti, S.E, M.M
 - a) Seksi Badan Kelembagaan dan Perizinan : Ratnawati, S.E
 - b) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan : Wira Dikara, S.E
 - c) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan : Suhartani Maimunah, S.H.
- 7) Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi : Ahmad Imron, S.H
 - a) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi : Asthoric, S.Ip
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Saptiana, S.Sos.
 - c) Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi : Filma Mega, S.E, M.E.Sy
- 8) Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro : Dentaria, S.Sos
 - a) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro : Husni Thamrin, S.Sos., M.M
 - b) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro : Media, S.H
 - c) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan : Muryati Nur Tofingah, S.Sos

9) UPTD



Gambar 3.1.
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

d. SDM Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur

harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2016 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut ini :

Tabel 4.6.
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
(Posisi 31 Desember 2016)

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)
1.	Laki- Laki	16
2.	Perempuan	11
Jumlah		27

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut ini :

Tabel 4.7.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi 31 Desember 2016)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pasca Sarjana (S2)	1
2.	Sarjana (S1)	18
3.	D3	2
4.	SMA	4
5.	SD	2
Jumlah		27

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4.7., tingkat pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 18 orang (66,66%). Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung secara umum. Jumlah Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang menamatkan pendidikan S2 sebanyak 1 orang.

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada tabel 4.8 dan menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 4.9. berikut ini :

Tabel 4.8.
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan/Ruang
(Posisi 31 Desember 2016)

NO.	PANGKAT (GOLONGAN/RUANG)	JUMLAH (ORANG)
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	2
	Jumlah	4
2.	Panata Tingkat I (III/d)	7
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4
	Penata Muda (III/a)	3
	Jumlah	17
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
	Pengatur Muda (II/a)	3
	Jumlah	6
4.	Tenaga kontrak	11
Jumlah Total		37

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Tabel 4.9.
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan
(Posisi 31 Desember 2016)

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	-				-
2.	Sekretariat		1	3	9	13

3.	Bidang Koperasi		1	5	2	8
4.	Bidang UKM		1	2	3	6
	Jumlah	-	3	10	14	27

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

e. Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

d) Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya

e) Pengadaan Mebel

f) Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi

g) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

h) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

i) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

j) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional

- c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - k) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- 5) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
- Kegiatan : (Tahun 2017 s/d 2021)
- a) Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM
 - b) Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi
 - c) Monev Koperasi Dana Bergulir
 - d) Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM
 - e) Fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro dan kecil

- f) Pengembangan promosi produk koperasi dan UMKM
 - g) Pengembangan Kewirausahaan
 - h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - i) Pengendalian Kredit Ekonomi Kerakyatan
 - j) Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Kegiatan : (Tahun 2016)
- a) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- Kegiatan : (Tahun 2016)
- a) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - c) Pengendalian Kredit Ekonomi Kerakyatan
- 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Kegiatan : (Tahun 2016)
- a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

- c) Penilaian terhadap kelembagaan koperasi dan PKM, pendataan keragaan koperasi dan rasionalisasi kelembagaan koperasi

9) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : (Tahun 2017 s/d 2021)

- a) Penataan organisasi dan Badan Hukum Koperasi

B. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa informasi terkait kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung. Dalam penyajian data tersebut disertai dengan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah disajikan di bab landasan teori atau lebih khususnya menggunakan teori kinerja organisasi yang disampaikan oleh hersey, blanchard, dan johnson.

1. Indikator Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu dan organisasi untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terkait bidang koperasi sebagaimana yang tertera dalam rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, ialah meningkatnya kualitas koperasi untuk perkembangan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi, yakni Ibu Filma Mega, S.E, M.E.Sy., yang dimaksudkan dari tujuan tersebut ialah meningkatnya jumlah koperasi yang aktif. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, antara lain seperti, sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, pembinaan, pengawasan, pemberian penghargaan koperasi, d.l.l.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Imron, S.H selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, yakni sebagai berikut :

“Ya, kami melaksanakan berbagai program terkait pemberdayaan koperasi, seperti pendidikan, pengawasan, penyuluhan, pelatihan, fasilitasi modal usaha, dll. Akan tetapi untuk program wajib yang telah kami tetapkan di renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung harus mengikuti anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung”. (Wawancara, 26 November 2017)

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti yang didapatkan dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dinas Koperasi dan UKM Kota

Bandar Lampung mengenai pelaksanaan program wajib dalam meningkatkan kualitas koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 dan 2016, terdapat dua program yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, dua program tersebut ialah sebagai berikut :

a. Kegiatan “*Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian*”

dengan total Jumlah Anggaran Rp.48.740.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.42.690.000,00 atau (87,59%).

Realisasi *Kinerja output* adalah berupa Tersosialisasinya perkoperasian sebanyak 100 orang (100%), *dengan hasil* yang dicapai yaitu terbentuknya koperasi baru 5 unit koperasi dengan pencapaian 100%.

b. Kegiatan “*pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi*” dengan total Jumlah Anggaran Rp.68.150.000 dengan

Realisasi Keuangan Rp.56.699.400,00 atau (83,20%)

Realisasi *Kinerja output* adalah berupa Terbinanya koperasi dan penilaian koperasi berprestasi, monitoring dana bergulir, menghadiri acara hari Koperasi Nasional sebanyak 80 unit koperasi, 28 koperasi dan 1 kali dengan hasil yang dicapai yaitu Diperolehnya Koperasi dan PKM Berprestasi sebanyak 15 Koperasi dan 6 PKM, termonitornya dana bergulir, ikut serta hari koperasi nasional dengan pencapaian 100%.

Kedua program tersebut dilaksanakan untuk menstimulasi kualitas koperasi-koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Hal ini, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Filma Mega, S.E, M.E.Sy selaku Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi, yakni sebagai berikut :

“Ada beberapa program yang kami jalankan dengan tujuan mengembangkan dan menstimulasi kualitas koperasi yang menjadi binaan kami, antara lain seperti sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dan BALATKOP Lampung”. (Wawancara, 6 November 2017)

Selain program wajib tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung juga menyelenggarakan beberapa agenda atau kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas koperasi di Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Imron, S.H selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, ialah sebagai berikut :

“Dinas Koperasi Kota sering mendapat kunjungan dari beberapa masyarakat yang memiliki rencana untuk membangun atau membentuk koperasi, kunjungan tersebut kami sambut dengan memberikan sedikit penyuluhan mengenai perkoperasian sehingga para calon pengelola koperasi tersebut dapat memahami jati diri dan asas koperasi. Penyuluhan ini juga sering dilakukan untuk para pengurus koperasi yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung agar mereka lebih memahami tentang pengembangan koperasi”. (Wawancara, 27 November 2017)

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Imron, S.H tersebut menunjukkan tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung kepada koperasi-koperasi

yang ada di Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi di Bandar Lampung melalui kegiatan penyuluhan.

Seperti yang penulis sampaikan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas dan UKM Kota Bandar Lampung, adapun kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di lokasi koperasi yang bersangkutan juga sering diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Filma Mega, S.E, M.E.Sy selaku Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi, ialah sebagai berikut :

*“Saya sering ditugaskan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk memenuhi undangan koperasi-koperasi yang membutuhkan tambahan ilmu tentang perkoperasian baik melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mereka selenggarakan atau diskusi kelompok kecil yang dihadiri oleh beberapa pengurus dan manajemen koperasi tersebut”.
(Wawancara, 7 November 2017)*

Berdasar pada hasil wawancara tersebut, kegiatan penyuluhan yang dipenuhi oleh Ibu Filma Mega, S.E, M.E.Sy sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan anggota koperasi, karena Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menjadi fasilitasi bagi pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman kepada anggota koperasi agar lebih memahami mengenai perkoperasian dan dapat turut andil dalam pengelolaan koperasi, sehingga berdampak pada fasilitas yang mereka dapatkan di Koperasi dan SHU.

Sebagai upaya mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung juga sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung, untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan dari apa yang disampaikan oleh pihak yang mengurus langsung agenda tersebut secara langsung di lapangan, yakni Bapak Jaka Prima selaku Staff Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, ialah sebagai berikut:

“Kita sering silaturahmi ke koperasi di Kota Bandar Lampung dan memastikan bahwa mereka tetap aktif dan berjalan sesuai dengan apa yang termaktub dalam UU, misalkan saya jalan ke kopma uin. Jika ada anggotanya, maka ada gerakannya, dan dapat dikatakan aktif. Ketika saya ke sana, sering menanyakan bagaimana kelanjutan usahanya. Saya sering memperhatikan tentang tertib administrasi koperasi tersebut dan memberi nasehat kepada mereka, seperti tentang cap, SIUP/SITU, Bagan Kepengurusan, dll. Akan tetapi, ketika kunjungan atau silaturahmi tersebut, saya sering kesulitan untuk menemui beberapa pengurus yang sedang menjabat, meskipun demikian kita selalu membangun hubungan kekeluargaan dengan pengelola koperasi terkait, sehingga ketika ada apa-apa, akan jadi lebih mudah untuk kami berkoordinasi dengan mereka”. (Wawancara, 27 November 2017)

Pernyataan yang dijabarkan oleh Bapak Jaka Prima tersebut

memberikan gambaran bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terus berupaya memberikan pembinaan secara langsung kepada koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pendekatan secara non formal dan kekeluargaan. Tentunya pelaksanaan agenda seperti ini menjadi lebih efektif untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berjalan cukup baik bila dilihat dari indikator tujuan. Sebagaimana yang digambarkan dari penjelasan sebelumnya mengenai upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuannya.

2. Indikator Standar

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai.

Standar menjawab pertanyaan tentang kapan sukses atau gagal. Kinerja seseorang atau organisasi dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan. Begitu juga dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan oleh Dinas Koperasi itu sendiri.

Berdasar hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Koperasi, bahwa standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tertuang dalam rencana strategis (renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota

Bandar Lampung. Berikut peneliti cantumkan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, yakni :

Tabel 4.10
Rencana Kinerja (Tapkin) Organisasi
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahun 2015				
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	310 Unit	Rp. 116.890.000
Tahun 2016				
2	Meningkatnya Kinerja kelembagaan dan Usaha Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Koperasi Aktif - Pertumbuhan jumlah anggota - Pertumbuhan volume usaha 	44,07% 0,4% 9%	Rp. 104.400.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.11
Standar/Indikator Kinerja Eselon III
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

NO	Pogram	Indikator Kinerja Program	Target	Tanda Tangan
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Kabid Koperasi, <u>Ahmad Imron, SH</u> NIP.19620502 199303 1 007

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.12
Standar/Indikator Kinerja Eselon IV
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Tahun	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Tersosialisasinya perkoperasian	100 Orang	2015	Kasi Penyuluhan Koperasi, <u>Hj. Filma Mega. SE</u> NIP.19670916 199902 2 001
2.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Terbinanya koperasi dan penilaian koperasi berprestasi, monitoring Dana Bergulir, menghadiri acara hari koperasi nasional	80 Unit Koperasi, 28 Koperasi, 1 Kali	2015 & 2016	Kasi Pemberdayaan Koperasi, <u>Septian Hs. S.Sos</u> NIP. 19660603 198610 2 002
3.	Penilaian terhadap kelembagaan Koperasi dan PKM, Pendataan Keragaan Koperasi dan Rasionalisasi Kelembagaan Koperasi	Terlatihnya Wirausahawan	15 Unit Koperasi	2016	Kasi Kelembagaan Koperasi, <u>Astorhie</u> NIP. 19600629 198103 1 003

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.13
Rencana Kinerja Pelayanan Koperasi (PP -6/2008)
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Indikator	Target SKPD	Target SKPD	Keterangan
		Tahun 2015	Tahun 2016	
1	Persentase Koperasi Aktif	43,17%	44,07%	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Berbagai bentuk standar di atas menjadi acuan umum bagi bidang yang menangani tentang pembinaan koperasi untuk menjalankan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi di Kota Bandar Lampung. Standar tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung pada akhir tahun dalam setiap tahunnya, untuk kemudian dijadikan landasan untuk tahun berikutnya. Realisasi tahun sebelum menjadi poros pelaksanaan untuk tahun selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti tambahkan realisasi pencapaian standar Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Tabel 4.14
Ringkasan Realisasi Tapkin dan Pendanaan
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
2015 dan 2016

No	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahun 2015				

1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Rp. 116.890.000	Rp. 99.389.400	85,03
	- Jumlah Koperasi Aktif	310 Unit	313 Unit	100,98
Tahun 2016				
2.	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Rp. 104.400.000	Rp. 0	0
	- Persentase koperasi aktif	44,07 %	47,97%	108,85
	- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	0,4%	8,6%	2150
	- Pertumbuhan volume usaha	9%	0,3%	3,33

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.15
Ringkasan Kinerja Pelayanan Koperasi (PP -6/2008)
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Indikator	Target SKPD	Realisasi	%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2015					
1	Persentase Koperasi Aktif	43,17%	43,29%	100,98	
Tahun 2016					
2	Persentase Koperasi Aktif	44,07%	47,97%	108,85	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 4.14 menggambarkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah berhasil mencapai standar yang telah ditetapkan bahkan lebih. Pada tahun 2015, ditetapkan standar atau target jumlah koperasi yang aktif sejumlah 310 unit dengan target anggaran sebesar Rp.

116.890.000, kemudian di akhir tahun 2015 terhitung jumlah koperasi yang aktif meningkat dengan sejumlah 313 unit dan pelaksanaannya menghabiskan dana sebesar Rp. 99.389.400. Adapun pada tahun 2016, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung masih menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kualitas koperasi atau kesejahteraan anggota koperasi, meskipun Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memberikan pendanaan dalam pelaksanaan program wajib tersebut.

Pada tahun 2016, terlihat bahwa, 1) persentase koperasi aktif berhasil mencapai 47,97 %, dimana angka ini melebihi dari target yang ditetapkan, yakni 44,07 %. 2) pertumbuhan jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan yang cukup tinggi melebihi dari standar yang ditetapkan yakni mencapai 8,6% dengan standar sebesar 0,4%. 3) Sedangkan untuk pertumbuhan volume usaha koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung belum mencapai standar yang telah ditetapkan, pertumbuhan volume usaha hanya mencapai 0,3% dengan standar sebesar 9 %.

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki kinerja yang cukup baik dalam meningkatkan jumlah koperasi yang aktif di Kota Bandar Lampung. Hal ini ditinjau dari keberhasilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang mampu melebihi target atau standar yang ditetapkan. Pada tahun 2015,

jumlah persentase pencapaian target mencapai 43,29 % melebihi dari standar yang sebesar 43,17 %. Selanjutnya pada tahun 2016, dapat dihitung juga bahwa koperasi aktif di Kota Bandar Lampung meningkat menjadi 47,97% dari 740 koperasi yang ada di Bandar Lampung, peningkatan ini juga diikuti dengan keberhasilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melebihi dari target yang ditetapkan, yakni 44,07%.

Berdasar hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki kinerja yang cukup baik jika dilihat dari indikator standar. Sebagaimana yang digambarkan dalam penjelasan sebelumnya mengenai pencapaian standar atau target yang telah diraih oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung.

3. Indikator Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan. Alat atau sarana sumber daya yang melakukan tugas pembinaan koperasi di sini tentunya sumber daya

manusia itu sendiri yaitu SDM Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Maka, Alat atau sarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kinerjanya ialah para pegawai Dinas Koperasi dan UKM itu sendiri.

Berdasar hasil wawancara peneliti, dalam upaya menyediakan alat atau sarana dalam rangka pembinaan koperasi di Kota Bandar Lampung berupa penyediaan pegawai yang mampu melaksanakan kinerja pembinaan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung masih minim alat atau sarana yang dimiliki, artinya sangat sedikit pegawai yang mampu untuk melaksanakan pembinaan kepada koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Jaka Prima, yakni sebagai berikut :

“Saya hampir selalu menjadi pegawai yang diminta untuk menangani langsung setiap permasalahan koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung di lapangan, makanya saya seakan menjadi pegawai yang memiliki spesialisasi dalam menggerakkan dan membina koperasi secara lapangan di Kota Bandar Lampung. Maka, wajarlah banyak pengurus koperasi yang lebih mengenal saya ke banding pegawai dinas yang lain. Kalo pegawai lain, ketika diberi tugas untuk terjun ke lapangan seperti saya, pasti kembali lagi minta bantuan saya untuk gantiin. Jadi, sangat sedikit sekali pegawai yang mampu menggantikan posisi saya dalam melaksanakan pembinaan di lapangan”. (Wawancara, 27 November 2017)

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Imran, S.H., ialah sebagai berikut :

“Ya, dek. Kalo terkait pembinaan koperasi langsung di lapangan, kami sering mengandalkan pak jaka. Karena beliau lah yang lebih

paham tentang keadaan koperasi-koperasi di Bandar Lampung secara lapangan Atau karena saat ini sudah ada PPKL, maka PPKL juga menjadi andalan kami untuk melaksanakan program-program pembinaan bersifat lapangan.” (Wawancara, 27 November 2017)

Begitupun juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ratnawati, S.E. selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan, yakni sebagai berikut :

“Kita memang dinas koperasi, tapi dinas koperasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian atau bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, ada yang mengurus UKM, Sekretariat, Kepengawasan dan Kelembagaan. Dinas hanya memiliki 41 pegawai sedangkan harus menyesuaikan dengan jumlah 741. Dan khusus untuk bidang kita yang memang bertanggung jawab dalam membina di lapangan, kita hanya memiliki 6 pegawai untuk membina 741 pegawai. Maka hal tersebut sangat memberatkan bagi kita dan mau dibagi gimana pun juga, tetap akan menyulitkan. karena kita tidak melulu untuk mengurus pembinaan koperasi di lapangan. Untungnya saat ini kami sangat dibantu dengan adanya program kementerian, yakni pengangkatan PPKL, sehingga kami sangat terbantu dengan adanya program tersebut”. (Wawancara, 23 November 2017)

Dari sisi kuantitas, penyediaan pegawai-pegawai yang mampu melaksanakan kinerja pembinaan koperasi menjadi problematika tersendiri bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Apalagi jumlah koperasi yang ada di bandar lampung berkisar 741 koperasi, maka menjadi jumlah yang sangat tidak sebanding antara alat yang digunakan untuk membina dengan jumlah koperasi yang dibina.

Adanya kondisi seperti ini, maka tentunya akan terjadi permasalahan berupa tidak merata nya dalam pembinaan koperasi. Akan

ada koperasi yang tersentuh dan ada koperasi yang tidak tersentuh dengan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai tidak baik jika dilihat dari indikator alat atau sarana. Karena tidak efektifnya jumlah alat yang dimiliki untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kota Bandar Lampung.

4. Indikator Kompetensi

Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Begitu juga dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Dinas dalam menjalankan tugas pembinaan menjadi persyaratan utama. Kompetensi yang dimiliki pegawai dapat mempengaruhi kinerja dan sudut pandang pegawai terhadap kinerjanya di dalam pembinaan koperasi. Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat memungkinkan pegawai tersebut mewujudkan tugas dalam pembinaan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat diketahui, bahwa pegawai dan PPKL sebagai orang-orang yang melakukan pembinaan bisa dikatakan sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pembinaan. Namun jumlah dari pegawai masih terbatas. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Alam Munzir, S.Sos selaku manajer Koperasi Pilar Utama Telkom, yakni sebagai berikut :

“Selama ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sudah cukup baik dalam memberikan pembinaan dan fasilitasi terhadap kami, Dinas juga sering memberikan info-info tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Provinsi atau Balatkop Provinsi Lampung, jadi kami sering mendapat undangan dari berbagai kegiatan tersebut dan banyak mengetahui seputar perkoperasian dalam lingkup pemerintahan, pokoknya kalau terkait pembinaan, kami sudah merasa diberikan pelayanan dan pembinaan yang sudah baik dari Dinas Koperasi Kota, lebih khusus pembinaan tentang penertiban administrasi yang kadang harus dimiliki oleh koperasi di Indonesia, baik itu badan hukum, SIUP, SITU, RAT, LPJ, Renstra, dll”. (Wawancara, 27 November 2017).

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Bapak Dusra Hayadi, S.E. selaku Manajer Koperasi Pedagang Masyarakat Sejahtera (KOPPAMASTERA), yakni sebagai berikut :

“Terkait Kompetensi, saya nilai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sudah memiliki kompetensi di bidang pembinaan koperasi, apalagi sekarang ditambah PPKL yang membantu dalam memberikan pembinaan, jadi tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Kota untuk mensejahterahkan masyarakat melalui kelembagaan koperasi itu sudah dapat dikatakan sudah cukup terwujud, karena sudah banyak koperasi di Kota Bandar Lampung ini yang terbukti menjadi pilar ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung. Hanya saja, jika dikaitkan dengan jumlah pegawai

Dinas Koperasi Kota dengan jumlah koperasi yang ada di Kota Bandar Lampung itu masih jauh. Sehingga, pastinya masih banyak koperasi di Kota Bandar Lampung ini yang belum terjamah untuk diberikan pendidikan dan pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung”. (Wawancara, 27 November 2017).

Peningkatan kualitas pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung juga menjadi perhatian utama bagi Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai upaya untuk membina koperasi melalui Dinas Kota/Kabupaten. Maka beberapa kegiatan pelatihan dan pendidikan cukup sering dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas dari pegawai Dinas Koperasi dan dalam hal ini juga dirasakan oleh pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ratnawati, S.E selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan, yakni sebagai berikut :

“Alhamdulillah dari kementerian dan dari dinas koperasi provinsi juga sering mengadakan pelatihan ke kami selaku pembina dan pengawas koperasi di kota. Jadi dalam setahun kita mengikuti beberapa kali pelatihan-pelatihan. Yang tentunya meningkatkan kemampuan kami dalam membina koperasi”. (Wawancara, 23 November 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup baik. Sebagaimana penjelasan di atas terkait kualitas yang dimiliki oleh PPKL dan pegawai

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Tentunya walaupun dengan kompetensi atau kualitas yang dimiliki sudah cukup baik, apabila kuantitas atau jumlah pegawai tidak sesuai, pasti akan terdapat kendala dan hambatan yang akan terjadi, maka akan sulit untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Seharusnya kualitas yang cukup baik ini harus didukung juga dengan kuantitas atau jumlah pegawai yang sesuai agar tidak terjadi kendala dan hambatan. Jadi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung akan sulit untuk optimal karena kualitas kompetensi yang dimiliki pegawai tidak didukung dengan kuantitas atau jumlah pegawai yang cukup.

5. Indikator Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan yang mengakibatkan disinsentif.

Begitu juga dengan motif yang ada pada pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Motif menjadi pendorong

bagi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan tugas pembinaan koperasi.

Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki beberapa motif dalam melaksanakan pembinaan koperasi dan menjalankan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi di Kota Bandar Lampung. Berdasar pernyataan dari beberapa pegawai, dasar utama pelaksanaan tugas tersebut ialah pengabdian kepada masyarakat sebagai pelayan publik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ratnawati, S.E. selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan, yakni sebagai berikut:

“Karena kita merupakan abdi negara atau abdi masyarakat, maka harus melaksanakan pengabdian, pokoknya gimana koperasi kita ini harus maju. Kalau koperasi kita maju, artinya kita sukses dalam bekerja. Jadi intinya itu adalah pengabdian bagi kami selaku abdi negara”. (Wawancara, 23 November 2017).

Pernyataan tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak M. Haniefan Muslim, S.I.Kom selaku Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), yakni sebagai berikut:

“Ya, Tentunya motivasi utama kami dalam bekerja ialah sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat. Karena kita tahu dan sadar bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan yang sangat ideal bagi kemajuan ekonomi masyarakat jika dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi apabila koperasi ini dapat berkembang dengan diikuti kualitas yang baik di Kota Bandar Lampung, maka pastinya sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Untuk itu, hal hal seperti itu menjadi dorongan tersendiri bagi kami untuk bekerja.” (Wawancara, 23 November 2017)

Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung juga tentunya memiliki motivasi untuk mendapatkan gaji atau insentif dalam bekerja, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Nadi selaku Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Kota Bandar Lampung, yakni sebagai berikut:

“Merupakan hal yang lumrah jika gaji menjadi pendorong bagi pegawai untuk bekerja, karena setiap pegawai memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga tidak heran jika gaji atau upah menjadi penyemangat mereka untuk bekerja”. (Wawancara, 2 Desember 2017)

Berdasar pada hasil wawancara dan observasi peneliti tersebut, maka dapat diketahui bahwa pegawai memiliki alasan atau pendorong yang cukup tinggi dalam bekerja untuk melaksanakan tugas pembinaan. Kemudian juga didukung adanya gaji, insentif, dan honor kepada pegawai dan PPKL yang dapat mendorong motif dan motivasi pegawai dalam menjalankan tugas pembinaan. Dengan adanya motif dan motivasi yang cukup kuat ini, pegawai Dinas dan PPKL dapat melakukan dan menjalankan tugas pembinaan dengan semangat yang tinggi. Untuk itu, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dikatakan cukup baik jika ditinjau dari indikator motif.

6. Indikator Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada

adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap kualitas dan kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.

Begitu juga dengan pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Pegawai dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kinerjanya. Kinerja dari pegawai Dinas Koperasi akan lebih baik apabila para pegawainya termotivasi untuk bekerja guna mendapatkan kesempatan berprestasi. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa peluang untuk menunjukkan prestasi kerja di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung selalu ada. Yaitu dengan tercapainya visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, maka akan diberikan penghargaan kepada pegawai-pegawai Dinas Koperasi dari puncak pimpinan hingga pegawai paling bawah bisa mendapatkan suatu penghargaan atau prestasi apabila mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kelembagaan koperasi. Dengan adanya peluang ini maka dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pembinaan koperasi. Untuk

itu, jika dinilai dengan menggunakan indikator peluang, maka kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup baik.

7. Indikator Umpan balik

Antara tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan tujuan yang diidentifikasi oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik, dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, umpan balik merupakan masukan tugas pembinaan koperasi untuk dapat mensejahterahkan anggotanya. Dalam mengukur dari pencapaian kinerja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelembagaan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melaksanakan program penilaian kesehatan koperasi di Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Suhartati Maimunah, S.H. selaku Kasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan, yakni sebagai berikut:

“Dalam menilai koperasi-koperasi yang ada di Bandar Lampung kami berpedoman pada peraturan menteri nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan. Memang agak sedikit rumit kalau menggunakan permen itu untuk menilai kesehatan koperasi karena harus menghitung angka-angka

yang banyak. Tapi, meskipun demikian penilaian terhadap kesehatan koperasi jadi lebih akurat". (Wawancara, 23 November 2017)

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber di lapangan, dapat diketahui bahwa masih terdapat banyaknya koperasi yang tidak aktif karena berbagai macam faktor, khususnya faktor internal dari koperasi itu sendiri. Dalam hal ini lebih spesifik nya, banyak koperasi yang hanya memiliki struktur kepengurusan, tetapi tidak memiliki gerakan dan usaha yang dapat mensejahterahkan anggotanya atau bisa dikatakan sebagai koperasi abal-abal. Padahal, keberdayaan dan keterlibatan anggota pada setiap kegiatan koperasi itu harus diinisiasi oleh semangat dan kreativitas pengurus. bagaimana mungkin koperasi akan maju, jika para *top leader* dalam koperasi tersebut tidak memiliki semangat, keilmuan dan pengorbanan untuk memajukan koperasi. Jika ditinjau dari falsafah pada koperasi itu sendiri koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat, dimana maju mundurnya koperasi dikarenakan anggota itu sendiri dan anggota yang memiliki kewajiban penuh untuk mengelola dan mengawasi koperasi, yakni pengurus dan pengawas.

Pengaruh kurang bergairahnya anggota koperasi tersebut, khususnya pengurus dan pengawas. Dikarenakan kurang memahami dan tidak mampu menterjemahkan makna sesungguhnya dalam berkoperasi. Sehingga lebih cenderung memahami koperasi sebagai wadah usaha yang bersifat tradisional dan kelembagaan yang sebatas formalitas. Hal

ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abu Bakar Nata M. Kamil, S.E. selaku Ketua Pengurus Koperasi Tani Jaya Makmur Mandiri, yakni sebagai berikut :

“Sungguh sangat disayangkan, apabila koperasi hanya menjadi tempat pinjam-pinjam uang oleh anggotanya dan tidak menjadi wadah usaha bersama yang sesungguhnya dalam rangka saling mensejahterahkan sesama anggota, pastinya hal ini disebabkan karena tidak pahamnya anggota khususnya pengurus koperasi terhadap jati diri koperasi itu sendiri, ketidak pahaman ini tentunya mengakibatkan kurang bergairahnya setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi dan bahkan menyebabkan koperasi hanya papan nama, serta pasti ujung-ujungnya berimbas pada citra koperasi itu sendiri”. (Wawancara, 29 November 2017)

Pemahaman yang salah tersebut akan menjadi benalu penghambat tersendiri terhadap tumbuh kembangnya koperasi di Kota Bandar Lampung. Karena, apabila koperasi-koperasi yang telah berdiri dan tidak menunjukkan kemampuannya dalam mensejahterahkan anggotanya serta tidak memiliki karakter kemajuan, tentu akan memberi pengaruh yang buruk bagi penilaian masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap koperasi itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, masyarakat akan kurang tertarik untuk menjadi anggota koperasi. Seperti apa yang dijelaskan oleh M. Haniefan Muslim, S.I.Kom selaku Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), yakni sebagai berikut:

“Ya jelas, seharusnya kami fokus pada kualitas koperasi di Kota Bandar Lampung, karena apabila koperasi-koperasi di Kota ini memiliki kualitas yang baik, maka pastinya hal tersebut akan menjadikan koperasi memiliki citra yang baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat akan banyak yang tertarik menjadi anggota koperasi. Tapi, kalau Dinas hanya fokus pada kuantitas, tentunya

nilai kuantitas tersebut tidak akan bertahan lama kalau tidak dibarengi dengan kualitas”. (Wawancara, 29 November 2017)

Kondisi yang masih menunjukkan masih banyaknya koperasi yang tidak bergairah dalam menjalankan organisasi dan perusahaan koperasinya seperti yang dijelaskan sebelumnya memberikan peringatan kartu kuning untuk mulai diprioritaskannya pembinaan dari pemerintah terhadap laju perkembangan koperasi di Kota Bandar Lampung. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung seharusnya tidak hanya sekedar memeriksa RAT Koperasi, menjalankan prosedur berdasarkan undang-undang, tertib administrasi dan mendata koperasi saja. Tetapi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung harus mampu mengarahkan dan membina koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung agar mampu meningkatkan kualitas keorganisasian dan perusahaan koperasinya, sehingga koperasi-koperasi yang tidak aktif bisa menjadi aktif kembali dan koperasi yang sudah aktif menjadi lebih berkembang bahkan lebih maju dari yang sebelumnya.

Terutama pembinaan yang harus difokuskan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, yakni pembinaan dari segi perusahaan dalam koperasi tersebut atau jenis usaha yang tengah dijalankan oleh koperasi tersebut dengan tetap tidak menghilangkan prinsip *bottom to up* yang harus dimiliki oleh koperasi. usaha koperasi harus diarahkan pada

kemajuan teknologi dan persaingan pasar, agar koperasi juga memiliki daya saing di tengah arus persaingan perdagangan globalisasi yang lebih cenderung pada kebermanfaatan teknologi.

Jadi, monitoring dan evaluasi koperasi harus lebih diarahkan kepada usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap koperasi. Sehingga apabila ditemukan masalah dalam usaha koperasi, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mampu memberikan pengarahan dan saran yang lebih tepat untuk dijalankan oleh koperasi-koperasi binaannya.

Meninjau dari hasil analisis berdasarkan umpan balik ini, maka kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pembinaan koperasi dapat dikatakan kurang baik karena pembinaan yang dilakukan seperti penyuluhan, monitoring dan evaluasi belum sampai kepada pembinaan dalam kegiatan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh koperasi, serta tidak menyerap dan menindaklanjuti dari masukan yang didapat melalui proses pengukuran hasil kinerja atau dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung kurang mengimplementasikan solusi yang merupakan buah dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Sehingga hal itulah yang membuat koperasi kurang mendapat stimulasi untuk bertahan, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan koperasi tersebut tidak dapat

dipecahkan, dan membuat koperasi menjadi tidak aktif, sehingga sulit mencapai tujuan kesejahteraan bagi anggotanya.

Berdasarkan analisis dari 7 indikator di atas, dapat diketahui bahwa setiap indikator memiliki fokus dan hasil penilaian yang berbeda-beda. Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya untuk mensejahterahkan masyarakat melalui anggota koperasi di Kota Bandar Lampung memiliki kekurangan dan kelebihan di setiap unsur kelembagaannya. Peneliti menilai bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung cukup baik dalam upaya mensejahterahkan anggota koperasi melalui peningkatan kualitas koperasi di Kota Bandar Lampung. Penjabaran global dari proses penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16
Penilaian Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Indikator	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	Skor
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tujuan			√			3
2	Standar			√			3
3	Alat/sarana	√					1
4	Kompetensi			√			3
5	Motif			√			3
6	Peluang			√			3
7	Umpan Balik		√				2
Total Skor				3 + 3 + 1 + 3 + 3 + 3 + 2 = 18			
Skor Maksimum				5 x 7 = 35			

Persentase Skor	$18 / 35 \times 100 \% = 51,43 \%$
Konversi Nilai a. $0 \% < X \leq 20 \% = 1$ b. $20 \% < X \leq 40 \% = 2$ c. $40 \% < X \leq 60 \% = 3$ d. $60 \% < X \leq 80 \% = 4$ e. $80 \% < X \leq 100 \% = 5$	51,43 % berada pada rentang $40 \% < X \leq 60 \%$ atau 3 (Cukup Baik), Jadi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup baik.

Sumber : Peneliti, 2018.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi

Islam mengajarkan bahwa setiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan harus memuat hal yang dapat memelihara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau umat. Seperti yang tertera dalam kaidah fikih berikut,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ
مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*⁶⁶

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung atau dalam hal ini ialah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam merumuskan berbagai program-program pembinaan koperasi harus memiliki tujuan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan bagi anggota koperasi pada khususnya dan

⁶⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), h. 61 – 62.

masyarakat pada umumnya. Tujuan yang benar tentu cenderung akan mengarahkan pelaksanaan dari tujuan tersebut pada kinerja yang benar juga.

Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dengan menyelenggarakan beberapa program pembinaan terhadap koperasi yang dapat merangsang kemajuan dan meningkatnya kualitas koperasi itu sendiri merupakan tanggung jawab pemimpin atau pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Karena, peningkatan kualitas koperasi merupakan representasi dari peningkatan kualitas anggota yang merupakan bagian dari masyarakat, sehingga kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung pada khususnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung pada umumnya.

Tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi atau masyarakat yang diwujudkan dengan berbagai program-program pembinaan terhadap koperasi adalah aspek kehidupan bernegara dan kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah *shalallahu'alaihiwassallam*. Dalam hal ini, Rasulullah *shalallahu'alaihiwassallam* bersabda,

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى
النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ
بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ
زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ⁶⁷

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. (H.R. Bukhari no. 4789)

Adanya prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam berkinerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu akan melahirkan semangat untuk memiliki kinerja yang kompeten atau ahli. Pegawai Dinas Kota Bandar Lampung sudah cukup kompeten dalam melaksanakan pembinaan terhadap koperasi-koperasi di Kota Bandar

⁶⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari : Al Ilmu*, (Kairo : Al Mathba'ah As Salafiyyah, 1979), Bab : Nikah, h. 25.

Lampung. Dalam hal ini, Rasulullah *Shalallahu'alaihi wasallam* pernah bersabda,

إِذَا أُسِدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ
أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ⁶⁸

Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. (H.R. Bukhari no. 6015).

Jadi, profesionalisme atau kompetensi dalam menyelenggarakan urusan umat atau masyarakat sangatlah dibutuhkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Karena akan membawa pengaruh yang luas bagi kemaslahatan masyarakat melalui kelembagaan koperasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di Kota Bandar Lampung dengan berdasarkan perspektif ekonomi islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut penulis, kinerja tersebut sudah sesuai dengan ajaran nilai-nilai dalam Islam.

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari : Al Ilmu*, (Kairo : Al Mathba'ah As Salafiyyah, 1979), Bab: Barangsiapa Yang Ditanyai Tentang Suatu Ilmu, h. 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari semua indikator yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam tugas pembinaan koperasi di Bandar Lampung dinilai “cukup baik” dengan jumlah nilai 51,43 % atau berada pada rentang $40 \% < X \leq 60 \%$ yang merupakan kategori cukup baik. Dalam hal ini, peneliti memberikan kesimpulan tersebut dengan berpedoman pada konsep teori yang dikemukakan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson yang membagi menjadi 7 indikator, yakni sebagai berikut:
 - a. Dari segi indikator tujuan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai cukup baik.
 - b. Dari segi indikator standar, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai cukup baik.
 - c. Dari segi indikator alat/sarana, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai tidak baik.
 - d. Dari segi indikator kompetensi, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai cukup baik.
 - e. Dari segi indikator motif, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai cukup baik.

- f. Dari segi indikator peluang, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai cukup baik.
 - g. Dari segi indikator umpan balik, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dinilai kurang baik.
2. Berdasar pada perspektif ekonomi Islam diketahui bahwa pemimpin wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, ketika rakyat mengalami problem dalam ekonomi, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menambah kesejahteraan rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan melaksanakan berbagai program pembinaan kepada koperasi-koperasi di Kota Bandar Lampung merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan atau kemaslahatan rakyatnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu:

1. Alat/sarana dalam melaksanakan kinerja pembinaan perlu untuk ditambah, yakni Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung harus menambah pegawai untuk membina secara langsung koperasi-koperasi yang ada di Bandar Lampung. Pasalnya sekitar 700 koperasi yang tersebar di 20 kecamatan Kota Bandar Lampung harus mendapat

perhatian yang adil dan agar tidak hanya memfokuskan pada koperasi yang hanya berada di sekitar kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung saja. Untuk itu, membutuhkan jumlah pegawai yang kompeten dalam pembinaan lebih banyak agar dalam mencapai tujuan utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

2. Proses pembinaan sudah seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas perusahaan koperasi dan tidak hanya fokus pada pembinaan keorganisasian atau administrasi perkoperasian menurut UU dan peraturan pemerintah. Maka, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung membutuhkan lembaga kajian khusus yang membahas tentang pengembangan usaha koperasi di Kota Bandar Lampung. Agar dapat memberikan pembinaan yang optimal terhadap koperasi di Kota Bandar Lampung dalam hal peningkatan kualitas perusahaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Abdillah. *Musnad Al kabir*. Beirut : Muassasah Ar Risalah, 2001.
- Al Bukhari, Abu Abdillah Muhammad. *Shahih Al Bukhari* : Al Ilmu. Kairo : Al Mathba'ah As Salafiyyah, 1979.
- Almizan, A. Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian “Suatu pendekatan praktik”*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. (On-line), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kinerja>, (25 desember 2017).
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga, 2005.
- Baswir, Revrison. Koperasi Indonesia. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2015.
- BPS Kota Bandar Lampung, “Kondisi Geografis dan Administratif”. (On-line), tersedia di : <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>, (9 Desember 2017).
- Daymon, Christine dan Immy Holloway. *Qualitative Reseacrh Methods in Public Relations and Marketing Communications*, terjemahan Cahya Wiratama. Yogyakarta : Penerbit Bentang. 2008.
- Echdar, Saban. *Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal terhadap Pengembangan Human Capital : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik di Indonesia*. Makalah the 1 st symposium on integrating knowledge (The 1 st ASIK), Universiti Teknologi Malaysia, 20 juni 2014.

- Hamid, Sanusi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*. Yogyakarta : Deepublish, 2014.
- Harsoyo Y., et. al. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006.
- Heriyono. Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat. *Jurnal Ekonomi*, Nomor 1, Desember 2012.
- Hikam, Muhammad A.S. *Kinerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Industri*. Jakarta : PEP-LIPI, 1997.
- Info Publik, “Koperasi Minim Perhatian”. (On-line), tersedia di : <http://infopublik.id/read/41187/koperasi-minim-perhatian.html>, (27 januari 2017).
- Kanto, Muklis dan Patta Rapanna. *Filsafat Manajemen*. Makassar : Celebes Media Perkasa, 2017.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, “Data Koperasi”. (On-line), tersedia di : <http://nik.depkop.go.id/>, (29 Desember 2017).
- Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Menteri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UKM*, PMKUKM No. 13/Per/M.KUKM/X/2016, Pasal 1.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Perubahan Paradigma Peran Pemerintah dalam Pemeberdayaan Koperasi dan UMKM*. Makalah background study RPJMN tahun 2010 – 2014. bidang pengembangan koperasi dan UMKM, Bappenas, September 2008, h. 1 – 2.
- Martono, Nanag. *Metode Penelitian Sosial “Konsep-konsep kunci”*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta : Kalam Mulia, 1996.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015.
- Nur, Hadi. *Proceedings : Integrating with science and religion*. Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2014.
- Purnama, Agung Eko. Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Justitia Islamica*, Nomor 1, Januari – Juni 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Kemdikbud RI, 2008.
- Rai, I Gusti Agung. *Audit Kinerja pada Sektor Publik : Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Ramadhan, Bagus Mohamad. Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun. *JESTT*, Nomor 4, Juli 2015.
- Retnowati, Daru. *Strategi Pengembangan Kelombagaan dan Koperasi melalui Sistem Demokrasi di Indonesia*, Seminar Nasional Informatika 2009, UPN Veteran Yogyakarta, 23 Mei 2009.
- Sardar, Ziauddin. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Nomor 5, Mei 2016.
- Sodiq, Amirus. Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*, Nomor 2, Desember 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2014.

Sulaiman, Abu Dawud. *Jual Beli dan Sewa*. Beirut : Dar Ar Risalah Al Alamiah, 2009.

Tambunan, Tulus. Identifikasi Rintangan Utama bagi Koperasi Indonesia Menuju Koperasi Global. *Jurnal INFOKOP*, Nomor 1, Oktober 2013.

_____. *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan : Masih Relevankah Koperasi di Dalam Era Modernisasi Ekonomi ?*. Jakarta : Pusat Studi Industri dan UKM Universtas Trisakti, 2008.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 1992. Sekretariat Negara. Jakarta.

Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Zarkasyi, Ahmad. Manajemen Kinerja dalam Tafsir Al-Qur'an dan Hadist Pendekatan Filsafat Tematik. *Jurnal Qolamuna*, Nomor 1, Juli 2016.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan P. Emir.M. Noor No. 11 Sumur Putri Teluk Betung Selatan Telpn 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35215

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070/ 653 /IV.05/2017

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang No. 9 tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing,Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
 4. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2015 tentang Kementrian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca** :
- Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeristas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Nomor: 1197/In.04/DE/PP.00.9/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Perihal Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA : **RIAN RAMADHAN / 1351010031** ✓
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung
Lokasi :
1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
2. Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung
3. Koperasi Syari'ah BTM Bandar Lampung
Lamanya : 2 (Dua) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah
Judul : " **ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** "

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : **07 NOVEMBER 2017 S/D 07 JANUARI 2018**

- CATATAN** :
1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian/survey yang bersangkutan
 2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 07 November 2017

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG

Pih. Sekretaris
Kabid PMSD,

MUDA BASTARI, SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611212 199203 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sbg Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
3. Sdr. Pimpinan Koperasi Mekar Sai Bandar Lampung
4. Sdr. Pimpinan Koperasi Syari'ah Bandar Lampung
5. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
6. ----- Arsip -----



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran dan memberikan masukan serta wawasan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas bimbingan dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No.32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No.12 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 35 tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
 7. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor 255 tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung.
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, Nomor: SP.DIPA-025.04.4.424260/2017 Tanggal 07 Desember 2016
- Memperhatikan :** Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 18 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**
- Pertama :** Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas hendaknya Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembimbing I agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan Pembimbing II lebih menekankan bimbingannya pada aspek metodologi, masing-masing dengan tanpa mengenyampingkan antara aspek satu dari aspek lainnya;
- b. Redaksi judul dapat dirubah sepanjang tidak merubah inti permasalahan;
- c. Penyusunan skripsi mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi IAIN Raden Intan Lampung yang berlaku.

- Ketiga : Pembimbing diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017



SEKRETARIS,

h. Bahtudin

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017
TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	NAMA DOSEN / NIP	GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA	N P M	JUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Dr. H. Suharto, S.H, M.A	IV/e	Pembimbing I	Rodlotul Jannah	1351010007	ES
2	Prof. Dr Tulus Suryanto, MM., Akt	IV/c	Pembimbing I Pembimbing I	Khusnul Khotimah Rika Paramita	1351010022 1351010172	ES ES
3	Dr. Moh. Bahrudin, M.H	IV/a	Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I	Teddy Kurniawan Idvit Iganuzeprori A Ahmad Shodiqin Yudi Andika	1351010210 1251010098 1351010065 1351010203	ES ES ES ES
4	Hanif, S.E, M.M	IV/a	Pembimbing I Pembimbing I	Aditya Hernaldi Rian Ramadhan	1351010099 1351010031	ES ES
5	Dr. Heni Noviarita SE, M.Si	IV/a	Pembimbing II Pembimbing II	Khusnul Khotimah Rika Paramita	1351010022 1351010172	ES ES
6	Madnasir, S.E, M.S.I	IV/a	Pembimbing I	Weny Shofura Priliana	1351010151	ES
7	Ahmad Habibi, M.E	III/d	Pembimbing I	Maya Okta Riyana	1351010281	ES
8	A.Zuliansyah, SSI., M.M	III/d	Pembimbing II Pembimbing II	Teddy Kurniawan Yudi Andika	1351010210 1351010065	ES ES
9	Any Eliza, S.E, M.Ak	III/d	Pembimbing II Pembimbing II	Aditya Hernaldi Briandika Ramadhan	1351010099 1351010265	ES ES
10	Budimansyah M.Kom. I	III/c	Pembimbing I Pembimbing I	Briandika Ramadhan Himawan Susanto	1351010265 1351010259	ES ES
11	Vitria Susanti SP, M.A, M.Ec., Dev	III/c	Pembimbing II Pembimbing II	Idvit Iganuzeprori A Ahmad Shodiqin	1251010098 1351010203	ES ES
12	Deki Fermaniyah SE, M.Si	III/b	Pembimbing II	Weny Shofura Priliana	1351010151	ES
13	M. Kurniawan, SE, M.E.Sy	III/b	Pembimbing II	Maya Okta Riyana	1351010281	ES
14	Femei Purnamasari SE, M.Si	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Rodlotul Jannah Rian Ramadhan	1351010007 1351010031	ES ES



Dekan,
Moh. Bahrudin











KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

BLANKO KONSULTASI

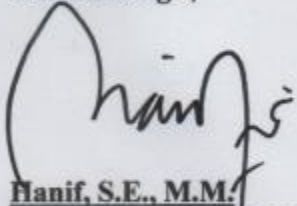
Nama Mahasiswa : Rian Ramadhan
NPM : 1351010031
Tahun Akademik : 2017/2018
Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.
Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E, M.Si
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

No.	Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	31 Januari 2017	Persetujuan sidang judul		
2.	10 Agustus 2017	Konsultasi proposal skripsi		
3.	14 Agustus 2017	ACC Proposal Skripsi untuk diseminarkan oleh Pembimbing I		
4.	12 September 2017	Bimbingan BAB I oleh Pembimbing II		
5.	26 September 2017	Bimbingan BAB I dan II oleh Pembimbing II		
6.	24 Oktober 2017	Bimbingan BAB III oleh Pembimbing II		
7.	14 November 2017	Bimbingan Revisi BAB I, II dan III oleh Pembimbing II		
8.	17 November 2017	ACC BAB I, II dan III oleh Pembimbing II		

9.	13 Desember 2017	Bimbingan BAB IV dan V		ng
10.	19 Januari 2018	ACC BAB I - V		ng
11.	22 Januari 2018	ACC BAB I – V Untuk dimunaqosahkan	h	fr

Bandar lampung, 29 Januari 2018

Pembimbing I,



Hanif, S.E., M.M.
NIP. 197408232000031001

Pembimbing II,



Femei Purnamasari, S.E., M.Si
NIP . 198405212015032004

DATA KERAJAAN KOPERASI AKTIF KOTA BANDA LAMPUNG
POSISI : 18 AGUSTUS 2017

NO	KELOMPOK KOPERASI	BADAN HUKUM		ALAMAT		KECAMATAN
		NOMOR 3	TANGGAL 4	JALAN 5		
I	2					
I	KUD					
1	1 KUD MINA LESTARI	6007.a/12-67	08/01/1967	JL. TELUK BONE NO. 61		TB TIMU R
2	2 KUD MINA JAYA	2193/BH/12-67-B	07/07/1967	JL IKAN BAWAL 3, Kangkung		Bumi Waras
3	3 KUD BUDI SANTOSO	463a/BH/8/82	14/03/1992	JL CIK DITIRO 17		KEMILING
II	KOPTAN/BUN					
4	1 KOP, SENTRA PENGEMB AGRIBISNIS	01/BH/DINKOP PKM &	06/01/2002	JL CIK DITIRO NO 54		KEMILING
III	KOPKAN					
5	1 KOPKAN ISM MITRA KARYA BAHARI	15/BH/X.9/VII/2011	21/07/2011	Jl. Laut Pulau Pasaran LK. II Kota Karang		TB TIMUR
IV	KOPNAK					
6	1 KOP. PERUNGGSAN TRI EKA SAKTI	106/KWK.7/X/98	30/10/1998	JL YOS SUDARSO 99		BUMI WARAS
V	KOPPONTREN					
7	1 NURUL ISLAM	892/BH/7/95	28/03/1995	JL SUBROTO NO. 55		BUMI WARAS
8	2 ALFALAH	906/BH/7/95	04/04/1995	SUMBER AGUNG		KEMILING
9	3 YAMAMA	978/BH/7/95	02/08/1995	LINGKUNGAN 5 Sumber Agung		KEMILING
10	4 ULUL ALBAB	010/BH/KDK.7.5/IV/00	16/04/2000	JL P. SEBESAU No.78		SUKARAME
11	5 NURUL JAMIL	023/BH/DKPKPM/V/2006	26/05/2006	JL FLAMBOYAN V SINAR INDAH NO.34 A		TJ. SENANG
12	6 HASANUDDIN	027/BH/X.9/X/2007	29/10/2007	JL MS. BATUBARA NO. 20 KUPANG TEBA		TB. UTARA
13	7 KOPPONTREN DARUL FATAH	006/BH/X.9/III/2008	18/03/2008	Jl. Kopi No. 13 A		RAJABASA
VI	KOPINKRA					
14	1 CITRA BUSANA	03/BH/KWK.7/IX/95	07/09/1995	JL. TANGKUBAN PERAHU 7		TB UTARA
15	2 KOPERTIMI	89/BH/KWK.7/IV/96	12/04/1996	JL URIP SUMOHARIO		WAY HALIM
VII	KOPTI					
16	1 PRIMKOPTI	450/BH/8/82	19/12/1982	JL. SUKARNO HATTA PO BOX 175		SUKABUMI
VIII	KPH					
17	1 KTS	3.a/BH/VII/I/68	19/06/1968	JL CUT MUTIA NO. 40 SUMUR BATU		TB UTARA
18	2 SAPTAWA	29.A/BH/VII-I/68	25/11/1968	JL WR. MONGINSIDI NO. 219		TB UTARA

19	3	INTAN SEJAHTERA (A.I.N RADEN INTAN	92/BH/8/1971	15/05/1971	LETKOL H. ENDRO SURATMIN KOMP IAIN Way Dadi	SUKARAME
20	4	SERBA GUNA (SMPN.8 KEDATON)	317/BH/8/1978	15/05/1978	JL UNTUNG SUROPATI GG. BUMI MANTI II NO.16	LAB RATU
21	5	PELITA	327/BH/8/1979	03/03/1979	JL M.YAMIN NO. 98 RAWALAUT	ENGGAL
22	6	KARYA SEHAT	380/BH/8/1981	01/04/1981	JL A.RIVAI NO. 6 PENENGGAHAN	KEDATON
23	7	BINA DARMA (UNILA)	398/BH/8/1981	12/09/1981	JL SUMANTRI BOJONEGORO NO. 1	LAB RATU
24	8	WARGA TEKNOLOGI (STM)	433/BH/8/1982	14/06/1982	JL SUMANTRI BOJONEGORO	LAB RATU
25	9	DISPENDA TK. I	444/BH/8/82	30/08/1982	JL HASANUDIN 45	TB UTARA
26	10	KURNIA (DISBUN TK I)	451/BH/8/82	04/10/1982	JL WR. MONGINSIDI	TB UTARA
27	11	STATISTIK TK. I	195.a/BH/8/73	05/11/1978	JL BASUKI RAHMAT 16	TB UTARA
28	12	SMAN.2 TANJUNGPANG	458/BH/8/82	01/12/1982	JL AMIR HAMZAH	TK PUSAT
29	13	BAHTERA KENCANA (BKKBN TK 1)	528/BH/7/84	07/02/1984	JL ABDI NEGARA	TB UTARA
30	14	PENGAYOMAN (DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM)	596/BH/7/86	16/01/1986	JL WR. MONGINSIDI	TB UTARA
31	15	RIMBA MAKMUR (DEP. KEHUTANAN)	599/BH/7/86	20/02/1986	JL DR. WARSITO	TB UTARA
32	16	KARYA SEJAHTERA (DINAS PERIKANAN TK. I)	145.b/BH/8/72	01/09/1972	JL DR. WARSITO NO.76	TB UTARA
33	17	SEJAHTERA (BPPV)	647/BH/7/89	10/04/1989	JL UNTUNG SUROPATI	LAB RATU
34	18	RAGOM GAWI	337/BH/8/1980	07/03/1980	JL DR. SUSILO NO. 7	TB UTARA
35	19	BARKAH (DEPAG TK. I)	409.a/BH/8/1981	25/04/1989	JL CUT MUTIA NO. 27 SUMUR BATU	TB UTARA
36	20	HANDAYANI	336.a/BH/8/1979	22/05/1989	JL AMIR HAMZAH GOTONG ROYONG	TK PUSAT
37	21	AL IKHLAS (KANDEP AGAMA)	179.a/BH/8/1973	28/09/1989	JL KH.A. DAHLAN NO. 28 PAHOMAN	ENGGAL
38	22	DEWI SRI (DINAS PERTANIAN TK. I)	505.A/BH/7/83	10/10/1983	DINAS PERTANIAN TK I	LAB RATU
39	23	BETIK HATI (SYAHBANDAR)	667/BH/7/1989	10/10/1989	JL Yos Sudarso No. 34a Pelabuhan Panjang	PANJANG
40	24	MELATI	668/BH/7/89	30/10/1989	JL DR. SUSILO	TB UTARA
41	25	AL HIKMAH (PENGADILAN AGAMA)	421.A/BH/8/82	07/11/1982	JL UNTUNG SUROPATI	LAB RATU
42	26	KPRI SUKA MAJU (KOSUMA SMPN 10)	676/BH/7/89	14/12/1989	JL PANGlima POLIM NO. 5	TK. BARAT
43	27	BETIK GAWI	307/BH/8/1977	28/03/1977	JL WR. MONGINSIDI NO.2 B DURIAN PAYUNG	TK. PUSAT
44	28	ANGKASAWAN (RRI TANJUNG KARANG)	193.a/BH/8/1973	25/06/1973	JL GATOT SUBROTO NO.26 PAHOMAN	ENGGAL
45	29	IMIGRASI (PENGAYOMAN DEPKUMHAM)	493.A/BH/7/83	20/10/1986	JL Hj. HANIAH NO. 3 CUT MUTIA	TB UTARA
46	30	RIMBA BHAKTI (KEHUTANAN TK. I)	726/BH/7/90	19/12/1990	JL Z.A. PAGAR ALAM	KEDATON
47	31	PENGAYOMAN (KOLAPAS)	687.A/BH/7/90	14/10/1990	JL PRAMUKA	RAJABASA
48	32	PENG. NEGRI KLAS I (YUSTIKA BAKTI)	651.A/BH/89	09/12/1989	JL WR. MONGINSIDI	TB UTARA
49	33	PENGADILAN TINGGI	767/BH/7/91	09/12/1991	JL CUT MUTIA	TB UTARA
50	34	SEJAHTERA (GURU SMK 4)	768/BH/7/91	09/12/1991	JL HOS COKROAMINOTO	ENGGAL
51	35	TK.KEBERSIHAN KOTA	771/BH/7/1992	05/01/1992	JL ANTARA	TK PUSAT
52	36	DIAN ANGGRAINI (DJA)	801/BH/7/92	30/12/1992	JL CUT MUTIA	TB UTARA
53	37	Koperasi Pegawai Negeri Waway Hati (SMPN 17 B.	829/BH/7/93	24/12/1993	JL ABDI NEGARA NO. 09	TB UTARA
54	38	SINAR SEJAHTERA (D.P. BENIH)	830/BH/7/93	24/12/1993	JL T. UMAR RAJABASA	RAJABASA
55	39	PERPUSTAKAAN LAMPUNG	840/BH/7/94	23/03/1994	JL WR. MONGINSIDI	TB UTARA
56	40	AUDITA (BPKP LAMPUNG)	859/BH/7/94	03/10/1994	JL BASUKI RAHMAT 33	TB SELATAN
57	41	MAKMUR (PENG. TINGGI AGAMA TK. I)	104/BH/KWK.7/IV/96	12/04/1996	JL BASUKI RAHMAT NO.24	TB UTARA
58	42	KREATIF (SMIK)	629/BH/KWK.7/XII/96	27/12/1996	JL P. TIRTA YASA	SUKABUMI

59	43	NUFIK SAYASA (SMTI)	18/BH/KWK.7.VI/97	09/06/1997	JEND. SUDIRMAN 43	ENGGAL
60	44	BUMI BHAKTI ADIGUNA	49/BH/KWK.7.X/96	14/10/1996	JL. BASUKI RAHMAT	TB UTARA
61	45	KOP. BETIK HATI (DIKLAT PROP.)	004/BH/KDK.7.4.II/99	16/02/1999	JL. GATOT SUBROTO 44 PAHOMAN	ENGGAL
62	46	BUMI BHAKTI ADHIGUNA (BPN-BL)	058/BH/KDK.7.4.VII/99	06/07/1999	JL. Drs. WARSITO No.5	TB UTARA
63	47	SERUMPUN (STATISTIK KOTA)	011/BH/KDK.7.5.IV/2000	21/04/2000	JL 5T SJAHRIR 80	TB UTARA
64	48	RUKN AGAWA SANTOSO JAYA (SMU 9)	013/BH/KDK.7.5.VI/2000	01/05/2000	JL PANGULIMA POLIM	KEDATON
65	49	TUNAS MEKAR (SLP 16)	033/BH/KDK.7.5.XII/2000	21/12/2000	JL C. MANGUNKUSUMO	TB UTARA
66	50	MADALIANS	009/BH/DINKOP. PKM &	17/06/2001	LETKOL HENDRO SURATMIN	SUKARAME
67	51	KARSATU	013/BH/DINKOP. PKM. PM/IX	05/09/2001	JL SUMATRA NO. 11	PANJANG
68	52	SINAR MAKMUR (BPG)	015/BH/DINKOP. PKM. PM/XI	21/11/2001	JL WAY RAREM NO 3	ENGGAL
69	53	WAHANA SEJAHTERA (DISHUB)	09/BH/DKPKPM/IV/2003	29/04/2003	JL BASUKI RAHMAT No. 21	TB UTARA
70	54	GURU DAN KARYAWAN SMAN I	018/BH/DKPKPM/XI/2003	02/11/2003	JL. JEND. SUDIRMAN 41	ENGGAL
71	55	DHARMA MANDIRI	013/BH/DKPKPM/VIII/2004	22/08/2004	JL SOEKARNO HATTA	RAJABASA
72	56	BALAI KARANTINA TUMBUHAN KLAS I PNJG	018/BH/DKPKPM/VII/2005	22/07/2005	JL JAWA NO. 03 PELABUHAN PANJANG	PANJANG
73	57	BETIK HATI (poltekkes)	028/BH/DKPKPM/IX/2006	13/09/2006	JL SOEKARNO HATTA NO. 1	RAJABASA
74	58	LABDA	31/BH/X.9.VIII/2009	18/08/2009	JL DR. SAMRATULANGI NO. 103	KEDATON
75	59	PEGAWAI TVRI "VISIANA LAMPUNG"	19/BH/X.9.XII/2011	13/12/2011	JL WAY NGARIP NO. 4 PAHOMAN	ENGGAL
IX	KOPKAR					
76	1	BANK INDONESIA	108/BH/8/1972	27/03/1972	JL. HASANUDIN NO. 36	BUMI WARAS
77	2	PT Bank Lampung Sairasan	522.a/BH/7/7/1984	09/01/1984	JL WR. MONGINSIDI NO.180	TB UTARA
78	3	KOPKAR POS INDONESIA	523.a/BH/7/7/84	09/01/1984	JL KH. A. DAHLAN NO. 21 PAHOMAN	ENGGAL
79	4	PT. KAI (PT. KERETA API)	572.a/BH/7/7/84	22/11/1984	JL KOTA RAJA NO.1	TK PUSAT
80	5	KOP. PEGAWAI TELKOM (KOPEGTEL)	591/BH/7/7/1985	12/08/1985	JL PAGAR ALAM NO. 27	KEDATON
81	6	KEKAL (PLN)	661/BH/7/7/89	08/08/1989	JL DIPONEGORO	TB UTARA
82	7	KOPEL BULOG DIVRE LAMPUNG	431.A/BH/8/8/82	07/03/1982	JL CUT MUTIA NO. 29 GULAK GALIK	TB UTARA
83	8	PT. ANDATU GROUP	700/BH/7/7/90	06/06/1990	JL SOEKARNO-HATTA KM 11	PANJANG
84	9	SUNGAI WARAS	708/BH/7/7/90	08/10/1990	JL IKAN KAKAP NO.9-12 T	TB SELATAN
85	10	BUKOPIN	721/BH/7/7/91	09/01/1991	JL WR. MONGINSIDI NO. 75	TB UTARA
86	11	KEKAR	500.a/BH/7/7/83	08/08/1989	JL YOS SUDARSO NO. 337	PANJANG
87	12	BATU BARA (KOPKARBARA)	742/BH/7/7/1991	22/05/1991	JL RAYA SRENGSEM KM 15	PANJANG
88	13	LAMPOST	758/BH/7/7/91	07/11/1991	JL SOEKARNO HATTA	RAJABASA
89	14	SAHID KRAKATAU HOTEL	772/BH/7/7/91	27/01/1991	JL YOS SUDARSO NO.294	PANJANG
90	15	ADI MAKMUR (PT. ADHI KARYA)	775/BH/7/7/92	13/03/1992	JL. ARIF RAHMAN HAKIM	SUKARAME
91	16	PT. PLN (Persero) SEKTOR PEMBANGKITAN BANDAR	788/BH/7/7/92	11/07/1992	JL RADEN GUNAWAN BLOK D NO.1	RAJABASA
92	17	DAUN LIMA MEKAR (PT. TASPEN)	791/BH/7/7/92	05/08/1992	JL. Drs. WARSITO no. 3	TB UTARA
93	18	DWI DHARMA BHAKTI (UBL)	794/BH/7/7/92	24/08/1992	JL ZA. PAGAR ALAM	LAB RATU
94	19	BUDI BHAKTI	841/BH/7/7/1994	22/03/1994	JL KAPTEN TENDIAN NO.4	TK PUSAT
95	20	KOPESTI	855/BH/7/7/94	26/08/1994	JL CUT NYAK DIEN Gg.SURYA	TK PUSAT
96	21	KOPKARKES (PT.ASKES)	879/BH/7/7/95	02/02/1995	JL T. UMAR NO.80 B	TK PUSAT

97	22	SHERATON INN	971/BH/7/95	25/07/1995	WR. MONGINSIDI 175	TB UTARA
98	23	PD WAHANA RAHARIA	132/BH/KWK.7/VI/96	13/06/1996	JL YOS SUDARSO NO.310	PANJANG
99	24	TIRTA MENARA NUSA	291/BH/KWK.7/VIII/96	22/08/1996	JL KH. A. DAHLAN 202	ENGGAL
100	25	WAT AGOW	587/BH/KWK.7/XI/96	07/10/1996	JL. PRINT. KEMERDEKAAN 5	TK TIMUR
101	26	SERBA GUNA (SMU BUDAYA)	614/BH/KWK.7/XI/96	01/11/1996	JL PENDIDIKAN No. 32	KEMILING
102	27	LATANSA (Yayasan Al Azhar Lampung)	626/BH/KWK.7/XII/96	23/12/1996	JL GN. TANGGAMUS RAYA	KEDATON
103	28	GRAMEDIA ASRI	37/BH/KWK.7/VIII/97	27/08/1997	JL R. INTAN 63	ENGGAL
104	29	LIA	73/BH/KWK.7/II/98	23/02/1998	JL KARTINI 40	TK PUSAT
105	30	LAMPUNG VENTURA	91/BH/KWK.7/IV/98	30/04/1998	JL SRIWIJAYA 7	TK PUSAT
106	31	PDAM WAY RILAU	072/BH/KDK.7.4/VIII/99	08/08/1999	JL P. EMIR M. NOOR 11 A	TB SELATAN
107	32	TUNAS BARU LAMPUNG	089/BH/KDK.7.4/X/99	23/09/1999	JL YOS SUDHARSO NO. 29	TB SELATAN
108	33	SUCOFINDO	34/BH/KWK.7/7/97	21/07/1997	JL GATOT SUBROTO No. 161	ENGGAL
109	34	PT PLN RAYON T. BETUNG	109/BH/KDK.7.4/I/2000	24/01/2000	JL M. SALIM BATUBARA	TB SELATAN
110	35	SYARIAH AL KAUTSAR	02/BH/DINKOP. PKM. PM. II/2	06/01/2002	SUKARNO HATTA	RAJABASA
111	36	IMANUEL	13/BH/DKPKPM/IX/2002	04/09/2002	JL SOEKARNO HATTA	SUKARAME
112	37	CIPTA MAKMUR	19/BH/DKPKPM/XI/2002	14/11/2002	JL LAKS MALAHAYATI No.228	TB SELATAN
113	38	GARUDA LAMPUNG	20/BH/DKPKPM/XII/2002	10/12/2002	JL Ir SUTAMI KM 06	SUKABUMI
114	39	BHANGGA LAMPUNG	08/BH/DKPKPM/IV/2002	27/04/2002	JL DR SUSILO No.53	TB UTARA
115	40	TOWER	014/BH/DKPKPM/VII/2005	04/07/2005	JL PANGERAN EMIR M NOOR NO 42	TB SELATAN
116	41	SEJAHTERA	013/BH/DKPKPM/VII/2005	04/07/2005	JL MA RAHMAN LK III	TB UTARA
117	42	AQUA DANONE GROUP	020/BH/DKPKPM/VIII/2005	15/08/2005	JL Letjen Ryacudu, Campang Raya	Sukabumi
118	43	PERUM DAMRI "MITRA MANDIRI"	035/BH/DKPKPM/XII/2005	23/12/2005	JL KAPTEN ABDUL HAQ NO. 28	RAJABASA
119	44	MULTIBREDAIR ADIRAMA INDONESIA	853/BH/7/1994	11/07/1994	JL Ir. SUTAMI KM. 9 CAMPANG RAYA	SUKABUMI
120	45	BINA SEJAHTERA CHANDRA SUPERMARKET	032/BH/DKPKPM/X/2006	02/10/2006	JL HAYAM WURUK NO. 1	TK. TIMUR
121	46	GURU DAN KARYAWAN MUTIA SMK N 3	007/BH/X.9/II/2007	20/02/2007	JL CUT MUTIAH NO. 21	TB UTARA
122	47	AT-TA'AWUN MUAMALAT	015/BH/X.9/VI/2007	04/06/2007	JL RADEN INTAN NO. 192	ENGGAL
123	48	RUMAH SAKIT ADVENT	016/BH/X.9/VI/2007	07/06/2007	JL TEUKU UMAR NO. 48	KEDATON
124	49	RUMAH SAKIT BUMIWARAS	025/BH/X.9/IX/2007	26/09/2007	JL W. MONGINSIDI NO. 225	TB. UTARA
125	50	ISAB "SEJAHTERA BERSAMA"	014/BH/X.9/IV/2008	09/05/2008	JL. Yos Sudarso KM 7	Panjang
126	51	TERATA	020/BH/X.9/VIII/2008	25/08/2008	JL. Ir. Sutami Km. 8,5 Campang Raya	SUKABUMI
127	52	PERUM PERUMNAS B. LAMPUNG (KOPKARNAS)	11/BH/X.9/III/2009	16/03/2009	JL. Imam Bonjol KM. 11 Ruko BKP No. 94	Kemiling
128	53	MUTIARA KARYA SUPER	16/BH/X.9/IV/2009	15/04/2009	JL. AMD Bayur Bawah	TK. Timur
129	54	MITRA SEJAHTERA	11/BH/X.9/VI/2011	16/03/2011	JL. Sultan Agung Ruko Centre Niaga no. 10/11	WAY HALIM
130	55	URIP JAYA	04/BH/X.9/III/2012	01/03/2012	JL. URIP SUMOHARJO NO. 200	WAY HALIM
131	56	PEKARYA GAS (KOPERGAS)	06/BH/X.9/IV/2012	04/04/2012	JL. Bumi Manti Gg. Delima RT.03 LK.III	LAB RATU
132	57	Koperasi Karyawan Tribun Lampung	27/BH/X.9/XI/2015	24/11/2015	JL. ZA Pagar Alam No. 83 Kel. Gedong Meneng	Rajabasa
133	58	Koperasi Karyawan Palm Lampung Persada	002000/BH/M.KUKM.2/IX/2	05/09/2016	JL. Ir. Sutami KM 7 Kel. Campang Jaya	TK. TIMUR
134	59	Koperasi Karyawan Mitra Lampung Ventura	002084/BH/M.KUKM.2/IX/2	13/09/2016	JL. Diponegoro No. 69A kel. Gulak Galik	TB. UTARA
X		KOP. TN				

135	1	PRIMKOP KARTIKA GARUDA HITAM	222/BH/8/74	12/11/1974	T. UMAR No. 85 Penengahan	KEDATON
136	2	PRIMKOP KARTIKA GAJAH MADA LAMPUNG	96/BH/8/71	06/06/1971	JL BASUKI RAHMAT NO. 30	TB SELATAN
137	3	PRIMKOP KARTIKA VIKU AJENREM 043 GATAM	95.a/BH/8/71	27/08/1971	JL SUKARNO HATTA NO. 3	SUKARAME
138	4	PRIMKOP KARTIKA DWI CAKTI / denpal	190/BH/8/1973	03/10/1973	JL SUKARNO HATTA	SUKARAME
139	5	PRIMKOP KARTIKA GARUDA HITAM 10	61/BH/8/1969	01/09/1969	KOMP ABRI JL. IMAM BONJOL	TK BARAT
140	6	PRIMKOP KARTIKA BENTENG LAMPUNG	294/BH/8/1976	13/09/1976	JL SUKARNO HATTA	SUKARAME
141	7	PRIMKOP KARTIKA DARMA GATI / denbekang	286/BH/8/1976	03/05/1976	JL SUKARNO HATTA	SUKARAME
142	8	PRIMKOP KARTIKA HESTI 043 GATAM	298/BH/8/1976	23/12/1976	JL K. RIVAI NO. 2 PENENGAHAN	KEDATON
XI KOP. POLRI						
143	1	PRIMKOPPOL POLRESTA BANDAR LAMPUNG	200.a/BH/8/1974	20/02/1974	JL MT. Haryono No. 15 B. DURIAN PAYUNG	TK PUSAT
144	2	PRIMKOPOLDA LAMPUNG	333.a/BH/8/1979	30/10/1979	JL WR. SUPRATMAN NO. 1 KUPANG KOTA	TB UTARA
145	3	PRIMKOPOL DITLANTAS	33/BH/KWK.7/V/97	21/07/1997	JL PRAMUKA	RAJABASA
146	4	PRIMKOPOL SPN KEMILING POLDA	022/BH/DKPKPM/XI/2004	11/01/2004	JL UNTUNG SUROPATI	KEMILING
XII KOP. SERBA USAHA						
147	1	SAMPURNA	256.a/BH/8/1975	15/04/1975	JL PELITA I NO. 5 LABUHAN RATU	LAB RATU
148	2	KARTIKA WIRAKARYA	615/BH/7/87	04/03/1987	JL PATIMURA NO.10	TB UTARA
149	3	HARKITI	679/BH/7/1989	19/12/1989	TJ.SENENG	TJ. SENANG
150	4	MAKMUR SEJAHTERA (PT.PUSRI)	743/BH/7/91	22/05/1991	JL DR. SUSILO	TB UTARA
151	5	CIPTA BANGUN USAHA (KCBU)	787/BH/7/92	01/01/1992	JL RADEN INTAN NO.100 a.b	ENGGAL
152	6	ARJO MAKMUR	007/BH/KDK.7.5/III/2000	07/03/2000	Jl. Samratu langi 19	KEDATON
153	7	PANDAWA	015/BH/KDK.7.5/V/2000	11/05/2000	Jl. Tanguban Perahu 3	TB. UTARA
154	8	MITRA SEJAHTERA	017/BH/KDK.7.5/V/2000	22/05/2000	Jl. P. Moratri No D3	WAY HALIM
155	9	MAWAR INDAH	016/BH/DKPKPM/IX/2003	24/09/2003	Jl. Pajajaran Gg. Salonooyo 4	KEDAMAIAN
156	10	BERINGIN	009/BH/X.9/IV/2007	03/04/2007	Jl. TEUKU CIK DITIRO NO. 6	KEMILING
157	11	PERAJIN SULAM USUS & TAPIS (KOPSUTA) " TUKUN"	029/BH/X.9/XI/2007	13/11/2007	Jl. KUTILANG NO. 19/5 TJ. AGUNG	TK. TIMUR
158	12	KSU MANDIRI	005/BH/X.9/III/2008	14/03/2008	Pasar Bambu Kuning Plaza Lantai III	TK. Pusat
159	13	KSU RAJA GADING MANDIRI	007/BH/X.9/IV/2008	11/04/2008	Jl. Merbau Komplek Bank Indonesia No. 43 A	KEDAMAIAN
160	14	PENGINYONGAN	28/BH/X.9/VII/2009	29/07/2009	Jl. Purnawirawan Gunung Terang	LANGKAPURA
161	15	MANDIRI SENTOSA	43/BH/X.9/XI/2009	02/11/2009	Jl. Raden Pemuka Gg. Terong No. 2 Gn. Sulah	WAY HALIM
162	16	SMANSA '89	01/BH/X.9/II/2011	12/01/2011	Jl. Amir Hamzah No.19 Gotong Royong	TK. Pusat
163	17	USAHA KEMITRAAN BERSAMA (UKB) SEJAHTERA	05/BH/X.9/II/2011	21/02/2011	Jl. Bhayangkara No. 66 Rajabasa Raya	RAJABASA
164	18	GUNA PURNA KARYA	08/BH/X.9/VI/2012	03/07/2012	Jl. Raden Intan No. 51	TK. Pusat
165	19	PELARIS	10/BH/X.9/VII/2012	06/07/2012	Jl. Wiraswasta Gedung Meneng	RAJABASA
166	20	KOP. SYARIAH SERBA USAHA RACHMAT HIDAYAT	12/BH/X.9/VII/2012	16/07/2012	Jl. Cut Nyak Dien No. 74 Palapa	TK. Pusat
167	21	BERKAH AMANTA	19/BH/X.9/XII/2014	17/12/2014	Jl. Agus Salim I Blok B/9 komp. Villa Mas kota Baru	TK. TIMUR
168	22	KOPERASI SERBA USAHA 9528	20/BH/X.9/XII/2014	17/12/2014	Jl. A. Muis Perum GMI Blok D2/5 Gd. Meneng	RAJABASA
169	23	Koperasi Serba Usaha BMT Amanah 33	26/BH/X.9/X/2015	12/10/2015	Jl. Banten Gg. Kamboja No. 81 Kel. Bakung	T.B. Barat
170	24	Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Bersama	29/BH/X.9/XII/2015	10/12/2015	Jl. P. Belitung No. 39 Kel. Suka Bumi	Suka Bumi

171	25	Koperasi Serba Usaha Krakatau	30/BH/X.9/XII/2015	16/12/2015	Imam Bonjol No. 1000 a-b-c Kel. Langkapura	Kemiling
172	26	Koperasi Serba Usaha Bintang Sejahtera	32/BH/X.9/II/2016	29/02/2016	Jl. Pangeran Antasari Gg. Sadar 2 No. 49 RT. 02 Kel.	TK. Timur
173	27	Koperasi Serba Usaha "Al Fatih"	33/BH/X.9/III/2016	01/03/2016	Jl. Sutan Syahrir No.21 RT/LK 02 Kel.Pahoman	Enggal
174	28	Koperasi Serba Usaha Tani dan Nelayan Mina Asa	34/BH/X.9/III/2016	28/03/2016	Jl. Saleh Raja Kesuma Yudha Gg. Pangpangan No. 01	Tb. Barat
175	29	Koperasi Produsen Crafter Cinta Lampung	001653/BH/M.KUKM.2/VII/2016	20/07/2016	Jl. P. Alam Gg. Bahagia No. 37 kel. Segala Mider.	TK. Barat
176	30	Koperasi Konsumen Mina Putri Sejahtera	001764/BH/M.KUKM.2/VIII/2016	03/08/2016	Jl. Ikan Bawal Gg. Madu Rt. 27 Lk III Kel. Kangkung	BUMI WARAS
177	31	Koperasi Produsen Sinar Laut Raya	001725/BH/M.KUKM.2/VIII/2016	01/08/2016	Jl. Teluk Bone II Sinar Laut RT. 08 Lk. I Kota Karang Raya	TB. TIMUR
178	32	Koperasi Albakat Mitra Sejahtera	002817/BH/M.KUKM.2/XII/2016	12/12/2016	Jl. Ikan Hiu No. 56 Lk. I Rt. 03	TB. SELATAN
XIII KOP. BMT						
179	1	BMT. MUTTAQIN	007/BH/DKPKPM/V/2004	30/04/2004	PASAR PASIR GINTUNG	TK PUSAT
180	2	BMT. SYARIAH MAKMUR	001/BH/X.9/II/2007	10/01/2007	Jl. SULTAN AGUNG TIRTAYASA 118	SUKABUMI
181	3	BMT. MUAMALAH	002/BH/X.9/II/2007	10/01/2007	Jl. Soekarno Hatta no. 10 Bandar Lampung	RAJABASA
182	4	BMT. BERKAH MANDIRI	022/BH/X.9/IX/2007	07/09/2007	Jl. TERUSAN KRAKATAU NO. 1	SUKABUMI
183	5	BMT. AL-HANIF	030/BH/X.9/XI/2007	19/11/2007	Jl. SALEH RAJA KESUMA YUDA NO. 7	TB. BARAT
184	6	BMT. KIKS EL ZAHRA	03/BH/X.9/II/2009	16/01/2009	Jl. Urip Sumoharjo No. 47	WAY HALIM
185	7	BMT KIKS SHARE AL ZAHRA PANJANG	12/BH/X.9/III/2009	30/03/2009	Jl. Yos Sudarso No. 330	Panjang
186	8	BMT KIKS NUR HADIROH	35/BH/X.9/IX/2009	16/09/2009	Jl. Imami Bonjol No. 178 Sukajawa	TK. Barat
187	9	BMT KIKS AL AROPAH	36/BH/X.9/IX/2009	16/09/2009	Jl. Endro Suratmin No. 242 A	Sukarame
188	10	BMT EL HANIF	42/BH/X.9/XI/2009	02/11/2009	Jl. Saleh Raja Kesuma Yuda No. 7	TB. BARAT
189	11	BMT AR-RAHMAN	06/BH/X.9/III/2010	23/03/2010	Jl. Griya Kencana Blok I No. 3	Rajabasa
190	12	BMT KIKS Makmur Mandiri	02/BH/X.9/II/2012	16/02/2012	Jl. Durian No. 9 LK. III	Sukarame
191	13	BMT Darul Muslimin	05/BH/X.9/IX/2013	27/09/2013	Jl. P. Antasari - Perwira No. 12 Tj. Baru	Kedamaian
XV KOP. DISTRIBUSI						
192	1	KIPAS ALAMI	03/BH/X.9/II/2012	22/02/2012	Jl. Pagar Alam Kel. Segalamider	TK BARAT
XVI KOPAS						
193	1	KOSUYA	320/BH/8/1978	07/12/1978	Jl. IMAM BONJOL GG. TIMBANGAN NO. 35	TK BARAT
194	2	BINA USAHA	420/BH/8/1982	16/03/1982	PASAR KANGKUNG BLOK D	BUMI WARAS
195	3	CIMENG	648/BH/8/89	11/04/1989	PASAR CIMENG	TB BARAT
196	4	HARAPAN KITA	748/BH/7/91	10/07/1991	PASAR PANJANG	PANJANG
197	5	KOTA KARANG SEJAHTERA (KOPAMASTERA)	014/BH/KDK.7.5/V/2000	10/05/2000	Jl. RE. MARTA DINATA NO. 3	TB. TIMUR
198	6	KOPPAS BARU PANJANG "ANUGERAH"	10/BH/X.9/V/2010	27/05/2010	Jl. YOS SUDARSO PASAR PANJANG	PANJANG
XVII KOP. P. KAKITIMA						

199	1	PADAGANG ABDI MAS	026/BH/KDK.7.4/IV/99	22/04/1999	" SUMANTRI BRONEGORO 1	RAJABASA
XVIII		KOPERASI SIMPAN PINJAM (K.S.P)				
200	1	KSPPK	94/BH/8/1971	15/06/1971	JL. PATIMURA Gg. Gn. Agung No. 1	TB UTARA
201	2	KOPDIT SETIA KAWAN	82/BH/KWK.7.1/II/96	14/02/1996	JL. YOS SUDARSO KM. 10 No. 40	PANJANG
202	3	KOPDIT CEMPAKA	063/BH/KDK.7.4/VII/99	20/07/1999	JL. HAYAM WURUK GG. MANGGA NO. 25	KEDAMAIAN
203	4	KOPDIT WAHANA ARTHA SELARAS (WARAS)	11/BH/DKPKPM/VIII/2002	20/08/2002	P. Tegal Gg. Apel No.45	SUKARAME
204	5	CIPTA KARYA	484.a/BH/8/83	12/04/1983	JL. SAMRATULANGI No. 93	KEDATON
205	6	KARYA BETANIA MANDIRI	013/BH/DKPKPM/IX/2003	09/09/2003	Jl. P. Niti Adat Gg St Ibu No 17	KEDAMAIAN
206	7	PRIMA SEJAHTERA	001/BH/DKPKPM/II/04	16/02/2004	JL. SUKARNO HATTA	SUKABUMI
207	8	KEDATON	681/BH/7/89	04/01/1989	JL. KENANGA NO. 7 SEPANG JAYA	LAB. RATU
208	9	SETIA ABADI	017/BH/DKPKPM/VIII/2004	30/08/2004	Jl. Soekarno Hatta KM 10 No. 29B	PANJANG
209	10	SRIKANDI	30/BH/KDK.7.5/XII/00	21/12/2000	Jl. Pelita Ujung No 15	LAB. RATU
210	11	KOPDIT SEJAHTERA	003/BH/DKPKPM/I/2005	27/01/2005	JL. TEUKU UMAR NO. 300	KEDATON
211	12	KOPDIT BAHTERA ADI GUNA	017/BH/DKPKPM/VII/2005	22/07/2005	JL. URIP SUMOHARIO NO. 39	KEDATON
212	13	MITRA USAHA MADANI	013/BH/DKPKPM/IV/2006	03/04/2006	JL. BIMA SAKTI BLOK B/3 NO. 2	KEMILING
213	14	REJEKI JAYA BERSAMA	021/BH/DKPKPM/V/2006	10/05/2006	JL. PULAU RAYA III NO. 41	TJ. SENANG
214	15	ANUGERAH	003/BH/X.9/I/2007	15/01/2007	JL. TANJUNG NO 40	TK. TIMUR
215	16	KARYA MULYA	004/BH/X.9/I/2008	21/01/2008	Jl. Pagar Alam Gg. PU No. 45 A	Kedaton
216	17	WUNI	15/BH/X.9/V/2008	09/05/2008	Jl. Rawa Subur No. 22	ENGAL
217	18	RAKHMAD SEJAHTERA	031/BH/X.9/XII/2008	24/12/2008	Jl. M. Nur I No. 53 Sepang Jaya	LAB. RATU
218	19	MANUNGGAL JAYA	21/BH/X.9/V/2009	25/05/2009	Jl. Tulang Bawang No. 18	ENGAL
219	20	TIRTA KENCANA	25/BH/X.9/V/2009	15/06/2009	Jl. Sinar Mulya No. 36 Keteguhan	TB. TIMUR
220	21	KIKS YUSUF MANDIRI	30/BH/X.9/VII/2009	14/08/2009	Jl. Endro Suratmin No. 499	Sukarame
221	22	TRI SATYA DHARMA	21/BH/X.9/XII/2010	06/12/2010	Perumahan Permata Biru Blok B8 13/8	sukarame
222	23	KIKS LAMPUNG SAI MADANI	09/BH/X.9/IV/2011	18/04/2011	Jl. Sutiyo No. 29A Kota Baru	TK. Timur
223	24	KIKS BENING RAYA	01/BH/X.9/I/2012	09/01/2012	Jl. Hos Cokroaminoto No. 112 Kel. Enggal	Enggal
224	25	KIKS SYAREKAH MANDIRI	01/BH/X.9/V/2013	01/05/2013	Jl. Kebersihan No. 4 Kel. Susunan Baru	TK. Barat
225	26	KIKS BINA MITRA USAHA	02/BH/X.9/V/2013	04/06/2013	Jl. Raden Intan Komplek Ramayana Lt. Basement Blok	ENGAL
226	27	MUSLIMAH SYARIAH	03/BH/X.9/V/2013	25/06/2013	Perum. BKP Blok W No. 120 Kemiling Permai	KEMILING
227	28	BERSA BASA MANDIRI	04/BH/X.9/V/2013	21/08/2013	Jl. Raden Imba Kesuma No. 57 Sumberejo Sejahtera	KEMILING
228	29	KIKS SEHATI	06/BH/X.9/V/2013	28/10/2013	Jl. Sasonoloyo No. 17 Kel. Gunung Sulah	WAY HALIM
229	30	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN	07/BH/X.9/I/2014	21/01/2014	Jl. Ikan Bawal Gg. Madu No. 3 Kangkung	BUMI WARAS
230	31	MITRA IKA SEJAHTERA	08/BH/X.9/I/2014	27/01/2014	Griya Inayah Jl. P. M. Noer Gg. Terusan kompl.	TB. Selatan
231	32	SEMESTA ALAM	12/BH/X.9/V/2014	08/05/2014	Jl. Sultan Agung Blok Y No. 23 WHP	WAY HALIM
232	33	KIKS BMT MADANI ARRAHMAH	13/BH/X.9/V/2014	26/05/2014	Jl. Way Pengubuan No. 32 Pahoman	ENGAL
233	34	KIKS AMAL INSANI	17/BH/X.9/XI/2014	20/11/2014	Jl. Komodor Adisucipto No. 81 Kebun Jeruk	TK. TIMUR
234	35	Koperasi Syariah Hafshatul Iman Sejahtera	35/BH/X.9/V/2016	07/04/2016	Jl. Nunyai Kel. Rajabasa Nunyai	RAJABASA
235	36	Koperasi Asa Wado Bersama	001682/BH/M.KUKM.2/VII/	26/07/2016	Jl. Ikan Layur C nomor. 13 A Teluk Betung	TB. Selatan

XXX	KOP. PROTESI	639/BH/7/89	01/03/1989	JL. A YANI	ENGGAL
257	1 KOP. WARTAWAN PWI CAB. LAMPUNG				
XXXI	KOP. LAINNYA				
258	1 SUMBER REJEKI	027/BH/KDK 7.5/XI/2000	15/11/2000	JL. R. BAKAUHENI KM. 15	PANJANG
259	2 PERGURUAN PAKU BANTEN	04/BH/DINKOP, PKM DAN	25/02/2002	KHAIRIL ANWAR NO 11	TJK PUSAT
260	3 MANDIRI TEFERLING	011/BH/DKPKPM/V/2003	11/05/2003	VILLA CITRA II Blok A.1. 17	SUKARAME
261	4 PILAR UTAMA	012/BH/DKPKPM/VIII/2004	09/08/2004	JL. CUT NYK DIEN NO. 78	TJK. PUSAT
262	5 JASA KONSULTAN FAK. PERTANIAN UNILA	016/BH/DKPKPM/VIII/2004	29/08/2004	FAKULTAS PERTANIAN UNILA	RAJABASA
263	6 AMANAH BAITUROHIM	015/BH/DKPKPM/VII/2005	04/07/2005	JL. PERUM KORPRI BLOK D NO 9	SUKARAME
264	7 IKATAN WARTAWAN INDONESIA (IKWI)	019/BH/DKPKPM/VII/2005	01/08/2005	JL AHMAD YANI NO 7	ENGGAL
265	8 BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)	024/BH/DKPKPM/X/2005	05/10/2005	JL. SENTOT ALI BASA Gg. PEMBANGUNAN NO. 3 Komple.	SUKARAME
266	9 SUMBER MAKMUR	031/BH/DKPKPM/XI/2005	14/11/2005	JL. TANSIMIGRASI NO. 77 PIDADA	PANJANG
267	10 MITRA MIKRO MINA	034/BH/DKPKPM/XII/2005	19/12/2005	JL RE. MARTADINATA SUKAMAJU	TB. TIMUR
268	11 SWADHARMA 46 BANDAR LAMPUNG	009/BH/DKPKPM/III/2006	14/03/2006	JL. LAKSAMANA MALAHAYATI NO. 18	BUMI WARAS
269	12 MEKAR SEJATI (DAMIRI)	019/BH/DKPKPM/VIII/2006	14/08/2006	JL KAPTEN ABDUL HAQ NO. 28	RAJABASA
270	13 SUTRAWA	030/BH/DKPKPM/IX/2006	25/09/2006	JL KIMAJA KOMP. RUKO WHP	WAY HALIM
271	14 KOPKAPATRA	031/BH/DKPKPM/IX/2006	28/09/2006	JL SUMATRA KOMP. PEL. PANJANG	PANJANG
272	15 SYARIAH SINAR SURYA	035/BH/DKPKPM/X/2006	31/10/2006	JL VANILI BLOK V NO. 15	KEMILING
273	16 TUNAS CITRA MANDALA	036/BH/DKPKPM/XI/2006	15/11/2006	JL DIPONEGORO NO. 96	TB. UTARA
274	17 SANG BUMI RUWA JURAI (SABURAI)	013/BH/X.9/V/2007	22/05/2007	JL. IMAM BONJOL NO. 468	LANGKAPURA
275	18 PUTIH TERPADU	014/BH/X.9/V/2007	30/05/2007	JL. SPN Untung Suropati Beringin Raya	KEMILING
276	19 KARYA MAKMUR	019/BH/X.9/VII/2007	31/07/2007	JL. BATU SANGKAR NO. 168	TK. PUSAT
277	20 PRAMUKA "TUNAS KELAPA"	031/BH/X.9/XI/2007	21/11/2007	JL. PRAMUKA NO. 4 RAJABASA	RAJABASA
278	21 TUNAS SEJAHTERA "KLS"	032/BH/X.9/XI/2007	27/11/2007	JL. KAMBOJA SRENGSEM	PANJANG
279	22 LAMPUNG SEJAHTERA "KLS"	033/BH/X.9/XI/2007	27/11/2007	JL. W. MONGINSIDI NO. 69 GD. PAKUON	TB. SELATAN
280	23 GALIH SAKTI	034/BH/X.9/XI/2007	29/11/2007	JL. PURNAWIRAWAN GG. WIRASWASTA 14	RAJABASA
281	24 JASA PRIMA	001/BH/X.9/II/2008	03/01/2008	Jl. Laks. Malahayati No. 14A Pesawahan	BUMI WARAS
282	25 FAJAR BANDAR LAMPUNG	008/BH/X.9/IV/2008	11/04/2008	Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 14 A	LAB. RATU
283	26 MAJU BERSAMA SAPU JAGAD	016/BH/X.9/V/2008	12/05/2008	Jl. KH Agus Salim No. 1	TK. Pusat
284	27 TANI JAYA MAKMUR MANDIRI	017/BH/X.9/VIII/2008	25/08/2008	Perum Nyunyai Blok A No. 6 D	Rajabasa
285	28 ARTHA KENCANA	033/BH/X.9/XII/2008	24/12/2008	Jl. P. Antasari Bukit Kencana Blok A No. 1	Sukabumi
286	29 LAMPUNG LESTARI PERTIWI	034/BH/X.9/XII/2008	24/12/2008	Jl. Laks. Malahayati No. 34 Bumiwaras	BUMI WARAS
287	30 SIGER SENTOSA	04/BH/X.9/II/2009	22/01/2009	Jl. Gajah Mada No. 87	TK. Timur
288	31 SEJAHTERA BERSAMA "B"	06/BH/X.9/II/2009	11/02/2009	Jl. M. Yunus Tanjung Senang	Tj. Senang
289	32				
290	33 SUER DANA	18/BH/X.9/IV/2009	22/04/2009	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Pusri No. 65	TK. Timur
291	34 KARYA BHAKTI	19/BH/X.9/IV/2009	28/04/2009	Jl. RA. Basyid Gg. Kemuning 6 No. 7	Tj. Senang
292	35 MITRA KARYA	20/BH/X.9/V/2009	14/05/2009	Jl. P. Legundi No. 31	KEDAMAIAN
293	36 RIZQY BERSAMA	24/BH/X.9/V/2009	02/06/2009	Jl. Imam Bonjol Gg. Sultan Anom	Kemiling

294	37	HELLAW SMPN 26	29/BH/X.9/X/III/2009	05/08/2009	II. Imam Bonjol No. 52	Kemiling
295	38	KINANDI JAYA	37/BH/X.9/X/2009	02/10/2009	Jl. P. Tirtayasa Perum Abdi Negara Blok B4 No. 10	Sukabumi
296	39	KENDI ARTHA	39/BH/X.9/X/2009	22/10/2009	Jl. Kartini No. 29 Durian Payung	TK. Pusat
297	40	GEMMA TAPIS	44/BH/X.9/X/2009	16/11/2009	Jl. Imam Bonjol No. 267 Gedung Air	TK. BARAT
298	41	TAPIS HUSADA	05/BH/X.9/X/2010	16/02/2010	Jl. Drs. Warsito No. 74 Sumur Putri	TB. SELATAN
299	42	ENGGAL LAMPUNG	08/BH/X.9/X/2010	26/04/2010	Jl. Singosari No. 40 Enggal	ENGGAL
300	43	KASALA	11/BH/X.9/X/2010	14/06/2010	Jl. Sjarif No. 5 B Kaliballau Kencana	KEDAMAIAN
301	44	LAMPUNG JAYA MANDIRI	12/BH/X.9/X/2010	14/06/2010	Jl. Merak V B 8 No. 18 Beringin Raya	Kemiling
302	45	SYARIAH MITRA BAROKAH	17/BH/X.9/X/2010	25/10/2010	Jl. Arief Rahman Hakim BTN III TR.06	Sukarame
303	46	PENATA SEJAHTERA	19/BH/X.9/X/2010	25/10/2010	Jl. Soekarno Hatta KM 15 No. 32 Srengsem	PANJANG
304	47	KOMRING CAROM LAMPUNG	20/BH/X.9/X/2010	18/11/2010	Jl. P. Antasari Gg. Tobari No. 3 Tj. Baru	KEDAMAIAN
305	48	INDONESIA BISA ABDI RAKYAT	02/BH/X.9/X/2011	12/01/2011	Perumahan Wisma Mas Blok F2 No. 2 Beringin Raya	Kemiling
306	49	JEJAMO SEJAHTERA DINAS PASAR	03/BH/X.9/X/2011	20/01/2011	Jl. Basuki Rahmad No. 26 Sumur Putri	TB. SELATAN
307	50	MINAGRO ALAM LESTARI	04/BH/X.9/X/2011	21/02/2011	Jl. Cut Mutia (Kantor NU)	TB Utara
308	51	TEGAR CITRA MANDIRI	06/BH/X.9/X/2011	24/02/2011	Jl. Ratu Diballau Gg. Kenanga No. 27	Tj. Senang
309	52	AMPERA	10/BH/X.9/X/2011	28/04/2011	Jl. Imam Bonjol No. 281 Gedung Air	TK. BARAT
310	53	RAGOM SEPAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG	12/BH/X.9/X/2011	16/06/2011	Jl. Dr. Susilo No. 2 Sumur Batu	TB. Utara
311	54	PAGUYUBAN NELAYAN PESISIR B. LAMPUNG	13/BH/X.9/X/2011	20/06/2011	Jl. Ikan Kiter No. 01 Kangkung	BUMI WARAS
312	55	AGRATAMA	17/BH/X.9/X/2011	11/10/2011	Jl. Sultan Agung Blok CC No. 1B	LAB. RATU
313	56	GATANI JAYA	20/BH/X.9/X/2011	13/12/2011	Jl. Ir. Juanda No. 11 Pahoman	ENGGAL
314	57	Koperasi Amanah Andalas Keluarga Besar Sumatera Barat	07/BH/X.9/X/2012	18/06/2012	Jl. Imam Bonjol No. 115 B Lebak Budi	TK. Pusat
315	58	KOPERASI DOSEN, MAHASISWA DAN ALUMNI (DOMALA)	09/BH/X.9/X/2012	06/07/2012	Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 12-14 Gd. Meneng	Rajabasa
316	59	KOPERASI KOMITE OLARHAGA INDONESIA (KONI)	11/BH/X.9/X/2012	12/07/2012	Jl. Way Lubuk No. 1 Stadion Pahoman	ENGGAL
317	60	KOP. KONSUMSI MITRA SEJAHTERA ABADI	11/BH/X.9/X/2014	21/04/2014	Jl. Soekarno Hatta No. 29 Bumi Kedamaian	KEDAMAIAN
318	61	KOP. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGEMUDI	14/BH/X.9/X/2014	11/09/2014	Jl. Gatot Subroto No. 41 E Pahoman	ENGGAL
319	62	KOPERASI SANITASI SEJAHTERA	15/BH/X.9/X/2014	06/10/2014	Jl. H. Komarudin Gg. Damai 2 Rajabasa Raya	rajabasa
320	63	KOPERASI SERIKAT MUAMALAT	16/BH/X.9/X/2014	13/10/2014	Jl. Mangkubumi No. 28 Segala Mider	TK. BARAT
321	64	KOP. CAHAYA MAKMUR	18/BH/X.9/X/2014	05/12/2014	Jl. Karya Bhakti Kampung Sinar Harapan Rajabasa Jaya	Rajabasa
322	65	KOPERASI SIGER MANDIRI STIE AZL	21/BH/X.9/X/2015	12/01/2015	Jl. ZA. PAGAR ALAM Pelita I No. 24 Lab. Ratu	LAB RATU
323	66	KOP. MADANI PRINTIS JAYA	22/BH/X.9/X/2015	17/03/2015	Jl. Basuki Rahmat No. 26 RT 14 Gd. Pakuon	TB. Selatan
324	67	KOP. WIDYA KARYA SEJAHTERA (WIKAS)	23/BH/X.9/X/2015	07/04/2015	Jl. Way Pisang No. 4 Rt. 04 Lk. II Pahoman	Enggal
325	68	KOP. SEJAHTERA KOSGORO ' 57	24/BH/X.9/X/2015	23/04/2015	Jl. Cut Nyak Dien No. 83 Kallawi	TK. BARAT
326	69	KOPERASI RAJAWALI SEJAHTERA	25/BH/X.9/X/2015	18/08/2015	J. Pagar Alam Gg. PU No. 144 Sgl. Mider	TK. Barat
327	70	KOPERASI SUKSES BERSAMA	28/BH/X.9/X/2015	07/12/2015	Jl. Cempegak Gg. Singgah Pay Gd Meneng	Raja Basa
328	71	Koperasi Konsumen Tunas Mulya Abadi	001431/BH/M.KUKM.2/VI/2	08/06/2016	Jl. Imam Bonjol No.448 A	Langkapura
329	72	Koperasi Konsumen Perempuan Wira Usaha	001526/BH/M.KUKM.2/VI/2	22/06/2016	Jl. Pulau Nias 3 No.07 RT.01	Sukabumi
330	73	Koperasi Konsumen Setia Usaha Dramaga Asri Lestari	001763/BH/M.KUKM.2/VIII/	03/08/2016	Jl. Griya Utama No.17A, RT.5, Lk. 1	Sukarame
331	74	Koperasi Konsumen Intan Indra Jaya	001874/BH/M.KUKM.2/VIII/	19/08/2016	Jl. Sisimangaraja, Gang Nuri No. 22	TK. BARAT
332	75	Koperasi Konsumen Rajom Mina Tirta	001928/BH/M.KUKM.2/VIII/	25/08/2016	Jl. Wa. Rahman Simpang Cibiah Kel. Batu Putuk	TB BARAT

333	1	KOP. SEK. SDN 3 KUPANG TEBAK	001/TDF/7.4/1986	03/03/1986	PANG TEBAK	TB. UTARA
334	2	KOP. SEK. SDN 5 TJK. PUSAT	002/TDF/7.4/1986	03/03/1986	IANJUNG KARANG	TJK. PUSAT
335	3	KOP. SEK. SDN 2 GEDONG AIR	003/TDF/7.4/1986	03/03/1986	GEDUNG AIR	TJK. BARAT
336	4	KOP. SEK. SDN 1 SUKARAME	004/TDF/7.4/1986	03/03/1986	SUKARAME	SUKARAME
337	5	KOP. SEK. SDN 1 PAHOMAN	005/TDF/7.4/1986	03/03/1986	PAHOMAN	ENGGAL
338	6	KOP. SEK. SDN 5 PANIANG	006/TDF/7.4/1986	03/03/1986	PANIANG UTARA	PANIANG
339	7	KOP. SEK. SDN 2 TJ GADING	007/TDF/7.4/1987	18/08/1987	TELUK BETUNG	TB. UTARA
340	8	KOP. SEK. SMA 1 TELUK BETUNG	008/TDF/7.4/1987	18/08/1987		TB. UTARA
341	9	KOP. SEK. SDN 4 KP SAWAH LAMA	009/TDF/7.4/1987	18/08/1987	KAMP. SAWAH LAMA	TK. TIMUR
342	10	KOP. SEK. SDN IV GEDONG AIR	010/TDF/7.4/1987	30/12/1987	GEDUNG AIR	TJK. BARAT
343	11	KOP. SEK. PGAN TJ KARANG	011/TDF/7.4/1988	03/03/1988	JL. GATOT SUBROTO	ENGGAL
344	12	KOP. SEK. SDN VI SUMBER REJO	012/TDF/7.4/1988	05/03/1988	SUMBEREJO	KEMILING
345	13	KOP. SEK. SMPN 6 TJ KARANG	013/TDF/7.4/1990	06/08/1990	JL. PANGGLIMA POLIM	KEDATON
346	14	KOP. SEK. SMA 2 TELUK BETUNG	014/TDF/7.4/1990	10/08/1990	JL. LAKSMANA MALAHAYATI	BUMI WARAS
347	15	KOP. SEK. SDN 5 KANGKUNG	015/TDF/7.4/1990	21/11/1990	JL. HASANUDIN	TB. SELATAN
348	16	KOP. SEK. SMK 4 TJ KARANG	016/TDF/7.4/1990	19/12/1990	JL. HOS COKROAMINOTO	ENGGAL
349	17	KOP. SEK. YAGSMI	017/TDF/7.4/1990	19/12/1990	SUKABUMI	SUKABUMI
350	18	KOP. SEK. SMA 2 TJ. KARANG	018/TDF/7.4/1991	31/03/1991	JL. AMIR HAMZAH NO. 82	TJK. PUSAT
351	19	KOP. SEK. TERATAI (SMEA PGR TAMSIS)	019/TDF/7.4/1992	22/11/1992	JL. WR. SUPRATMAN NO. 74	TB. UTARA
352	20	KOP. SEK. HEMAT KARAYA	020/TDF/7.4/1997	29/04/1997	JL. PEJAJARAN GG. SASONOLOYO	SUKARAME
353	21	KOP SEK SMP V GOTONGROYONG	021/TDF/7.4/1997	23/07/1997	SMP V GOTONG ROYONG	TK PUSAT
354	22	KOP SEK SMK NEGERI 1 B. LAMPUNG	022/TDF/7.4/1999	29/04/1999	JL. M. YAMIN	TK. TIMUR
355	23	KOP SEK SISWA MADALIANSA (MAN I)	023/TDF/7.4/1999	21/01/1999	JL. ENDRO SURATMIN MAN I	SUKARAME
356	24	KOP SEK SMK TRISAKTI	024/TDF/7.4/1999	01/05/1999	JL. CUT NYAK DIEN PALAPA	TK. PUSAT

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

1. Indikator Tujuan

Apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi di Kota Bandar Lampung?

2. Indikator Standar

Apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?

3. Indikator Alat/sarana

Apakah alat/sarana yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat efektif dalam melaksanakan tugas pembinaan koperasi di Kota Bandar Lampung?

4. Indikator Kompetensi

Apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas pembinaan koperasi di Kota Bandar Lampung?

5. Indikator Motif

Apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki motivasi untuk melaksanakan program pembinaan koperasi ?

6. Indikator Peluang

Apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki kesempatan untuk mendukung kinerjanya dalam meningkatkan kualitas koperasi di Kota Bandar Lampung?

7. Indikator Umpan Balik

Apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung selalu melaksanakan penilaian-penilaian atas prestasi kerja dan melakukan solusi atas kekurangan yang telah ditemukan pelaksanaan program pembinaan koperasi di Kota Bandar Lampung?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame Telp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : AHMAD IMRON, SH.
Umur : 56 TH.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Nama Instansi : DINAS KOPERASI DAN UKM BL.
Jabatan : KABID PEMBERDAYAAN & PEMBANGUNAN KOPERASI.
Alamat : JL.W. MONGINSIDI EG. PIPIT OT KEC.
PENBAJARAN KEC. T B U.
No. Telp/HP : 085269162095

Mengetahui,

AHMAD IMRON, SH.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : H. FILMA MEGA SE-ME

Umur : 50 th

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

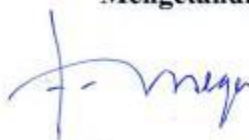
Nama Instansi : DINAS KOPERASI & UKM KOTA BANDAR LAMPUNG

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERKULIAHAN USAHA KOPERASI

Alamat : JL. SAUDI HASAN NO 13 LAB. DALAM TANJUNGSERANG B. BL

No. Telp/HP : 081379803161

Mengetahui,



FILMA MEGA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : BERTILIA UTARI, SE
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Instansi : Dinas Koperasi & UKM
Jabatan : Staf Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi
Alamat : JL. EBONI Blok TE.1 NO. 16 BTN 3
LIAT HALIM PERMAI
No. Telp/HP : 0812-791-5662

Mengetahui,

BERTILIA UTARI, SE



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : Ratnawati, SE.
Umur : 40 th
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Perizinan
Alamat : Jl. Hl. Nasir No. 190/6 Kota Baru
Tanjung Karang Timur
No. Telp/HP : 0852 6769 5029

Mengetahui,

Ratnawati, SE.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : SUHARTATI MAIMUNAH, SH
Umur : 48 THN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Nama Instansi : DINAS KOPERASI DAN UKM
Jabatan : KASI PENGAWASAN PEMERIKS. PENILAIAN KESEHATAN
Alamat : JL. P. SENOPATI Gg. SALEH
JATIMUIYO KEC. TJ. AGUNG
No. Telp/HP : 0852 7938 2004

Mengetahui,


Suhartati, M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : JAKA

Umur : 56

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

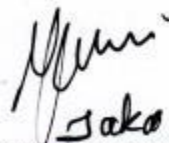
Nama Instansi : DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG

Jabatan : STAFF BIDANG KELEMBAGAAN

Alamat : JL. ANGGUN CIK TUNGAL, KEL. SUMUR
PUTRI, KEC. TELUK BETUNG SELATAN

No. Telp/HP : 0812 - 7888 - 3462

Mengetahui,


Jaka



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : M. HANIEFAN. MUSLIM. S.I. KOM
Umur : 27
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
Jabatan : Penyuluh Koperasi
Alamat : Jl. Nunyai blok A no 3B Rajabasa
No. Telp/HP : 0821 8402 3675

Mengetahui,


M. Haniefan M.



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA


**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : H. Abubakar Nata M. Kamil, S.E.
Umur : 51
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Instansi : Koperasi Tani Jaya Makmur Mandiri
Jabatan : Ketva
Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 18, Kemiling
kota Bandar Lampung
No. Telp/HP : 0812 - 7239 - 890

Mengetahui,


H. ABU BAKAR NATA M.K, SE.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : Alam Munzir, S. Sos.
Umur : 51 th.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Nama Instansi : Kop. Pilar Utama Telkom.
Jabatan : Manager.
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 78.
B. Lampung.
No. Telp/HP : (0721) 5600229 / 0821 77891844.



Mengetahui,

Alam Munzir



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame Telp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : MAS HUDA

Umur : Tert 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Instansi : KOPERASI Muka Jaya

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Jl. Kan mas K. III RT. 024
Kel. Kangkung. Kec. Bumi Waras

No. Telp/HP : 082306557665

Mengetahui,


MAS HUDA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : DUSRA HAYADI, SE.
Umur : 48 Th
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Nama Instansi : Koperasi Pasar Kota Karang
Jabatan : Manager.
Alamat : Jl. Agung I No. 89
Perumnas Way Halim
No. Telp/HP : 0821 8171 2223

Mengetahui,


Dusra Hayadi, SE.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

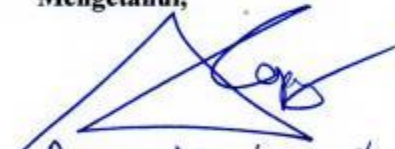
**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : Acep Maulana, S
Umur : 33
Jenis Kelamin : Laki - laki
Nama Instansi : Koperasi Karyawan Tower
Jabatan : Manajer
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.19 Tebet
B. Lampung
No. Telp/HP : 081278905631

Mengetahui,


Acep. Maulana, S



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Responden

Nama : MIFTAHUDIN
Umur : 32
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Nama Instansi : KSPPS BTM BINA MASYARAKAT UTAMA
Jabatan : MARKETING MANAGER
Alamat : DUSUN 1 JATI MULYO, KEL. JATI MULYO
KEC. JATI AGUNG
No. Telp/HP : 0856 - 5888 - 2754

Mengetahui,


MIFTAHUDIN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Let. Kol. Hl. Endro Suratmin Sukarame ITelp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung)

Profil Informan

Nama : Agus Nadi
Umur : 42
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Instansi : Dekopinda kota Bandar Lampung
Jabatan : Pengurus Bidang ketahanan Pangan
Alamat : Jl. Ikan Bawal, No. 26, kel. kangkung
kec. Bumi waras, kota Bandar Lampung
No. Telp/HP : 0852-6934-4776

Mengetahui,


AGUS NADI

DOKUMENTASI PENELITIAN



Narasumber : Ahmad Imron, S.H.
Jabatan : Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan
Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



Narasumber : Filma Mega, S.E., M.E.
Jabatan : Kasi Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan
Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



Narasumber : Bertilia Utari, S.E.
 Jabatan : Staff Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



Narasumber : Ratnawati, S.E.
 Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Perizinan
 Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



Narasumber : Suhartati Maimunah, S.H.
Jabatan : Kasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



Narasumber : Jaka Prima
Jabatan : Staff Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



Narasumber : M. Haniefan Muslim, S.I.Kom
 Jabatan : Penyuluh Koperasi
 Instansi : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung



Narasumber : Abu Bakar Nata M. Kamil, S.E.
 Jabatan : Ketua Pengurus
 Instansi : Koperasi Tani Jaya Makmur Mandiri



Narasumber : Alam Munzir, S.Sos
Jabatan : Manager
Instansi : Koperasi Pilar Utama Telkom



Narasumber : Mashudi
Jabatan : Sekretaris Pengurus
Instansi : Koperasi Mina Jaya



Narasumber : Dusra Hayadi, S.E.
Jabatan : Manager
Instansi : Koperasi Pedagang Masyarakat Sejahtera



Narasumber : Acep Maulana, S.E.
Jabatan : Manager
Instansi : Koperasi Karyawan Tower



Narasumber : Miftahudin
Jabatan : Marketing Manager
Instansi : KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama



Narasumber : Agus Nadi
Jabatan : Pengurus Bidang Ketahanan Pangan
Instansi : Dekopinda Kota Bandar Lampung